

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERUMAHAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KAB. POLEWALI MANDAR**

KATA PENGANTAR

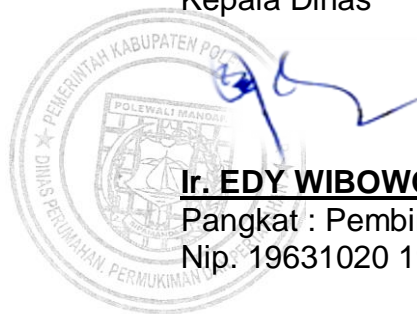
Segala Puja dan Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, tuhan semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. LAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kinerja Tahun Anggaran 2020

Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam pelaporan akuntabilitas ini meliputi pengukuran atas realisasi capaian kinerja dari indikator kinerja utama yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. **Realisasi Capaian Kinerja** tersebut telah dihadapkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. **Analisis Kinerja** memuat uraian tentang faktor-faktor pendukung dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

Penyusunan LAKIP telah dilakukan sesuai pedoman yang ada. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja ini tepat waktu dan berharap bahwa LAKIP ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Polewali, 16 Februari 2022

Kepala Dinas



Ir. EDY WIBOWO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19631020 199103 1 004

IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merupakan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama Tahun 2021

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2021, yang menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja. Dari 6 (Enam) sasaran dan 6 (Enam) Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut, yang dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Untuk Sasaran Strategis I “Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)” yang terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan capaian Realisasi indikator **105%**.
2. Untuk Sasaran Strategis II “Meningkatnya kawasan permukiman yang layak” yang terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan capaian setiap indikator **60,04%**.
3. Untuk Sasaran Strategis III “Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah” dengan jumlah indikator kinerja 1 (Satu) capaian realisasi **74,48%**.
4. Untuk Sasaran Strategis IV “Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran” yang terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan yang masih dalam proses penilaian.
5. Untuk Sasaran Strategis V “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja” yang terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan yang masih dalam proses penilaian.
6. Untuk Sasaran Strategis VI “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah” yang terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan yang masih dalam proses penilaian.

Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 10.145.417.530,00 dengan Realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp 10.024.857.164,00 atau sebesar 98,81%, sisa kurang anggaran Rp120.560.366,00, dan realisasi fisik 99%

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Iktisar Eksekutif.....</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar isi.....</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel.....</i>	<i>iv</i>
<i>Daftar Grafik.....</i>	<i>vii</i>
<i>Daftar Gambar.....</i>	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	18
B. Akuntabilitas Keuangan...	105
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Langkah-Langkah Perbaikan kedepan.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	Perjanjian Kinerja 2020
Lampiran II	Pengukuran Kinerja 2020
Lampiran III	Realisasi Anggaran 2020

Daftar Tabel

Tabel.1.1	<i>Jumlah ASN Menurut Golongan Desember Tahun 2021</i>	7
Tabel.1.2	<i>Komposisi Jabatan Terisi / Lowong Desember Tahun 2021</i>	7
Tabel. 1.3	<i>Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan Desember Tahun 2021</i>	8
Tabel. 1.4	<i>Keadaan Sarana dan Prasarana Desember Tahun 2021</i>	9
Tabel. 2.1	Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	14
Tabel. 2.2	Target Sasaran Strategis yang di tetapkan Dalam Renstra 2019-2024	15
Tabel. 2.3	<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar</i>	17
Tabel. 3.1	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	20
Tabel. 3.2	Permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM	21
Tabel. 3.3	<i>Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021</i>	21
Tabel. 3.4	<i>Data Capaian Akhir Periode RENSTRA sebelumnya (2013-2018) dan Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 - 2021</i>	23
Tabel. 3.5	<i>Capaian Sasaran Sasaran Strategis I</i>	24
Tabel. 3.6	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2019 s.d 2021</i>	25
Tabel. 3.7	Jumlah Data Base Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2016-2021	26
Tabel 3.8	Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2016-2021	26
Tabel 3.9	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I 2019-2021 dengan Target akhir Periode Renstra</i>	26
Tabel. 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator “Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	27
Tabel. 3.11	<i>Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran “Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni”</i>	30
Tabel. 3.12	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021</i>	30
Tabel. 3.13	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020</i>	31

Tabel. 3.14	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas rumah layak huni Tahun 2019</i>	32
Tabel. 3.15	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas rumah layak huni Tahun 2018</i>	32
Tabel.3. 16	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020</i>	33
Tabel. 3.17	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020</i>	34
Tabel. 3.18	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019</i>	35
Tabel. 3.19	<i>Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak HuniSNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018</i>	36
Tabel. 3.20	<i>Capaian Sasaran Sasaran Strategis II</i>	44
Tabel. 3.21	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2019-2021</i>	45
Tabel. 3.22	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II 2019-2020 dengan Target akhir Periode Renstra</i>	46
Tabel. 3.23	<i>Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</i>	46
Tabel. 3.24	<i>Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan di Sesuai SK Bupati Polewali Mandar Nomor 624 Tahun 2020 Kabupaten Polewali Mandar</i>	48
Tabel. 3.25	<i>Baseline Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang menjadi target RPJMD</i>	49
Tabel. 3.26	<i>Sub Kegiatan yang mendukung Indikator : Luas Kawasan Kumuh</i>	50
Tabel. 3.27	<i>Lokasi Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2021</i>	51
Tabel. 3.28	<i>Lokasi Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2020</i>	51
Tabel. 3.29	<i>Sasaran Strategis III</i>	56
Tabel. 3.30	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2019-2021</i>	58
Tabel. 3.31	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III 2019-2020 dengan Target akhir Periode Renstra</i>	59
Tabel. 3.32	<i>Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat Keadaan 31 Desember 2021</i>	60
Tabel. 3.33	<i>Data Luasan Tanah Milik Pemda Bersertifikat Sampai Tahun 2021</i>	86
Tabel. 3.34	<i>Data Luasan Tanah Milik Pemda Bersertifikat Sampai Tahun 2020</i>	86
Tabel. 3.35	<i>Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019</i>	87

<i>Tabel. 3.36</i>	Program dan Kegiatan Sasaran Strategis III	87
<i>Tabel. 3.37</i>	Daftar Usulan Pensertifikatan Hak Pakai Instansi (HPI) Tahun 2021	88
<i>Tabel. 3.38</i>	Daftar Usulan Sertifikat Hak Pakai Instansi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020	90
<i>Tabel. 3.39</i>	Data Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	92
<i>Tabel. 3.40</i>	Data Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020	92
<i>Tabel. 3.41</i>	Data Pengadaan Tanah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019	92
<i>Tabel. 3.42</i>	Data Pengadaan Tanah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018	93
<i>Tabel. 3.43</i>	Data Penanganan Sengketa Tanah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	95
<i>Tabel. 3.44</i>	Sasaran Strategis 4	99
<i>Tabel. 3.45</i>	Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis IV	100
<i>Tabel. 3.46</i>	Sasaran Strategis V	101
<i>Tabel. 3.47</i>	Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis	103
<i>Tabel. 3.48</i>	Sasaran Strategis VI	103
<i>Tabel. 3.49</i>	Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis VI	105
<i>Tabel. 3.50</i>	<i>Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021</i>	106

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Data Pengadaan Tanah Tahun 2018 s.d 2021	93
------------	--	----

Daftar Gambar

Gambar 1.1 *Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan*

6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja instansi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (good governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;



10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud : sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan: adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk uraian singkat mengenai apa-apa yang dibebankan kepada instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dari masing-masing bagian dari organisasi.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dengan susunan perangkat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang terdiri dari 2 sub Bagian
 - Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Ka. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Perumahan
 - Ka. Seksi Pengembangan dan Penataan Perumahan Formal
 - Ka. Seksi Pengembangan dan Penataan Perumahan Sawadaya
- d. Kepala Bidang Permukiman yang terdiri dari 2 seksi
 - Ka. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman
 - Ka. Seksi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
- e. Kepala Bidang Pertanahan yang terdiri 2 seksi
 - Ka. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
 - Ka. Seksi Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan

2. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu bupati dalam melaksanakan urusan perumahan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah

2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menjalankan fungsi sebagai berikut:

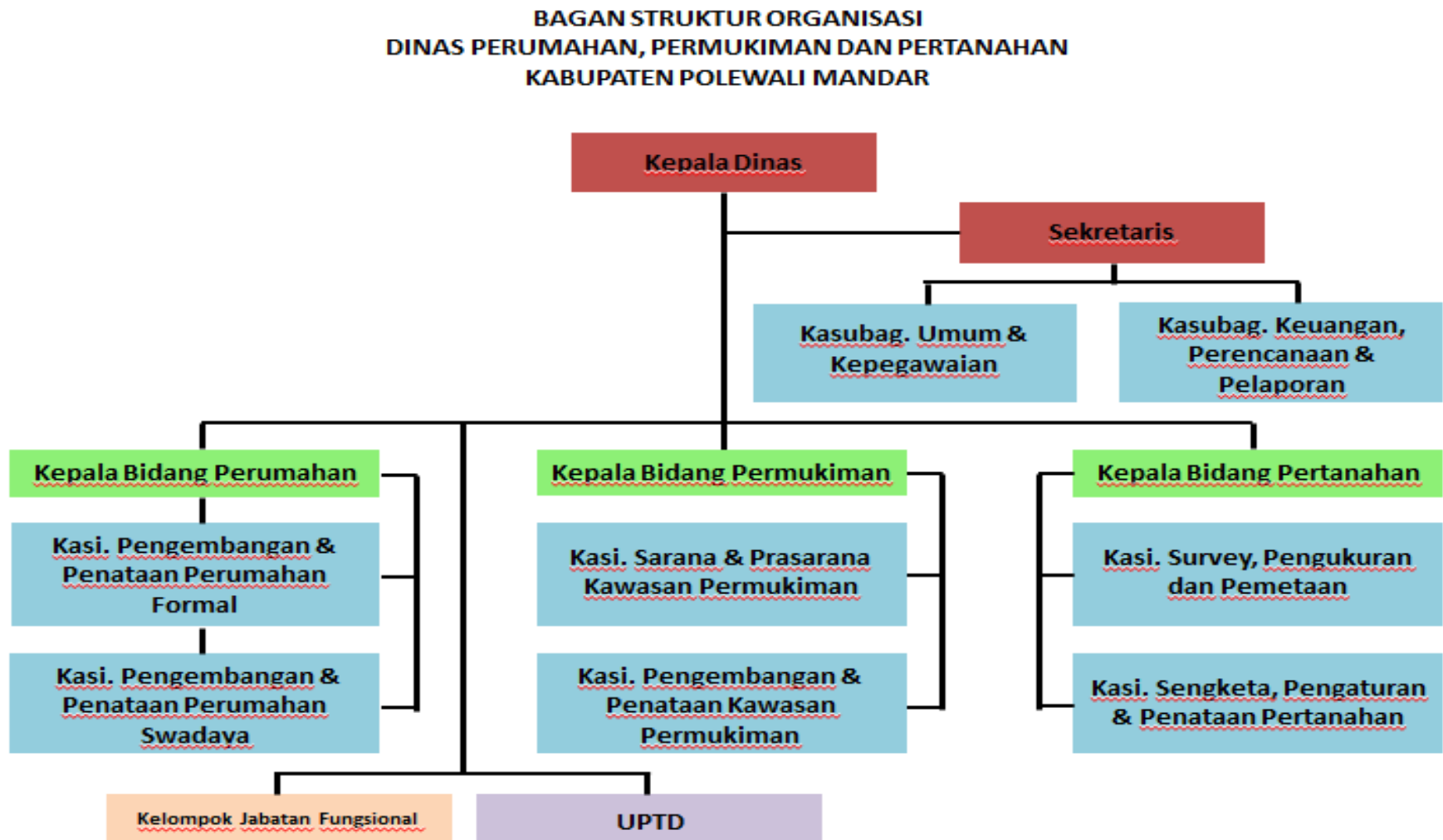
- Perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- Pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan
- Pelaksanaan evaluasi pelaporan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan



- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



3. KONDISI ORGANISASI

a. Kondisi Kepegawaian

Tabel 1.1
Jumlah ASN Menurut Golongan
Desember Tahun 2021

No Urut	Gol	Ruang Gaji/ Jenis Kelamin								Jumlah		Ket
		A		B		C		D		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	IV	2	1	1	-	1	-	-	-	4	1	5
2	III	1	4	4	5	1	4	3	-	9	13	22
3	II	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	6	5	5	2	5	3		13	16	29

Sumber: Kasubag Umum & Kepegawaian Sekretariat Disrumkimtan 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk akhir tahun 2021 sebanyak 29 Orang

Tabel.1.2
Komposisi Jabatan Terisi / Lowong
Desember Tahun 2021

No Urut	Gol	Eselon / Jenis Kelamin								Jumlah		Ket
		II/B		III/A		III/B		IV/A		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	IV	-	1	1	-	2	-		1	3	2	5
2	III	-	-	-	-	1	-	3	4	4	4	8
Jumlah		-	1	1	-	3	-	3	5	7	6	13

Sumber: Kasubag Umum & Kepegawaian Sekretariat Disrumkimtan 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 Komposisi jabatan Struktural di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebanyak 13 Jabatan Dan komposisi tersebut telah terisi, yang terdiri dari :

1. Jabatan Eselon II/B sebanyak 1 Orang
2. Jabatan Eselon III/A sebanyak 1 Orang
3. Jabatan Eselon III/B sebanyak 3 Orang
4. Jabatan Eselon IV/A sebanyak 8 Orang



Tabel 1.3
*Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan
 Desember Tahun 2021*

No Urut	Tamatan	L	P	Jumlah		Ket
				L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	2	-	2	2
4	DIPLOMA II/III	-	1	-	1	1
5	STRATA 1 S1	6	8	6	8	14
6	STRATA 2 S2	7	5	7	5	12

Sumber: Kasubag Umum & Kepegawaian Sekretariat Disrumkimtan 2021

Berdasarkan tabel 1.3 diatas jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan keadaan Desember 2021, menunjukkan bahwa jumlah PNS yang memiliki:

1. Ijazah S2 sebanyak 12 ASN,
2. Ijazah S1 sebanyak 14 ASN
3. Ijazah DII/DIII sebanyak 1 ASN
4. Ijazah SLTA sebanyak 2 PNS

Selain ASN terdapat pula tenaga PTT dan Tenaga Rusunawa yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dengan sistem perjanjian kinerja yang diberikan upah setiap bulan. Untuk tenaga PTT ditempatkan pada Sekretariat dan Bidang – Bidang sedangkan Tenaga Rusunawa bertugas mengelola Rusunawa.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar juga telah



didukung oleh Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas yang diemban. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

*Tabel 1.4
Keadaan Sarana dan Prasarana
Desember Tahun 2021*

NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	Filling Kabinet	2	2		
2	Lemari Arsip Besi	2	2		
3	Meja 1 Biro	10	10		
4	Meja ½ Biro	20	19	1	
5	Lemari Arsip Kayu	2	2		
6	UPS	3			3
7	Mesin Ketik	-			
8	Cermin	1	1		
9	Komputer (PC)	2	2		
10	Papan Informasi	7	2		5
11	Jam Dinding				
12	Air Conditioner (AC)	14	11		3
13	Mesin Faximile Panasonic	1		1	
14	Kursi Rapat	9			9
15	Kursi Tamu	3	3		
16	Televisi 21 Inchi	1	1		
17	Televisi 32 Inchi	1	1		
18	Televisi 43 Inchi	1	1		
19	Kamera Digital	5	2	1	2
20	Wireless & Stand Mic	1	1		
21	Kompor Gas + Tabung	1	1		
22	Lemari Pakaian	1	1		
23	Lemari Piring	1	1		
24	Receiver + Antena Parabola	1			1
25	Dispenser	6	3	1	2
26	Lemari Televisi	1	1		
27	Telepon	1		1	
28	Rak Buku	6	6		
29	Laptop	6	2	2	1
30	Notebook	16	9	4	3



1	2	3	4	5	6
31	Printer A3	1			1
32	Printer A4	12	8	1	3
33	Printer Pita A4	1			1
34	LCD Proyektor + Layar	1	1		
35	Taplak Meja Rapat	4	3		1
36	Rice Cooker	1	1		
37	Meja Rapat	4	4		
38	Papan Nama Pejabat	4	2	2	
39	Sound Sistem (Loud Speaker)	1	1		
40	Motor Roda Dua	17	17		
41	Meja Telepon	1	1		
42	KembangHias	4			4
43	Absen Elektronik	1		1	
44	Scanner	1	1		
45	Lemari Arsip Kaca	4	3	1	
46	Printer Laser Shot Canon/LBP 6000	2	2		
47	Mesin Pompa Air Shimzu	1			1
48	Hardisk External	-			
49	Mouse	2	1		1
50	Papan Struktur	5	1	4	
51	Handy Talkie	5	5		
52	Kamera Drone	1	1		
53	GPS	1	1		
54	Teodolite	1	1		
55	Meja ½ Biro	4	4		
56	Lemari Arsip Kayu	3	3		
57	Komputer (PC)	1	1		
58	Kursi Tamu	1	1		
59	Televisi 43 Inchi	1	1		
60	Dispenser	1	1		
61	Laptop	2	2		
62	Printer A4	3	3		
63	Absen Elektronik	1	1		
64	Lemari Arsip Kaca	2	2		
64	Handy Talkie	2	2		
65	Comnav	1	1		
66	Meja Pelayanan	1	1		
67	Antena Penerima VHF	2	2		



1	2	3	4	5	6
68	Mesin Pemotong Rumput	2	2		
69	Kamera	1	1		
70	Proyektor	1	1		
71	Brankas	1	1		
72	GPS	3	3		

Sumber: Pengelola Barang Milik Daerah Disrumkimtan 2021

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar T.A 2021 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar Nomor B-01/Setda/Organisasi/060/01/2022, tanggal 07 Januari 2022, hal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Memuat penjelasan singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan)
- B. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (Memuat penjelasan umum tentang organisasi dengan penekanan pada aspek strategi organisasi)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (Memuat penjelasan singkat tentang Renstra, meliputi Visi, Misi, Tujuan sasaran serta Indikator Kinerja utama/sasaran)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2020 (Memuat target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

- A. Akuntabilitas Kinerja
 1. Diuraikan per tujuan, per sasaran, per indikator sasaran



2. Untuk setiap indikator sasaran, dijelaskan dengan 5 syarat minimal data kinerja berupa tabel atau grafik dan penjelasan memadai yaitu :

- Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
- Uraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan
- Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan
- Analisis Efisiensi sumber daya (Anggaran)

B. Akuntabilitas Keuangan

- Menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja langkah-langkah masa datang organisasi

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja 2021
- Pengukuran Kinerja 2021
- Realisasi Anggaran 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Di dalam Renstra tertuang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024.

VISI

”Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”

Dan ditetapkan Empat (4) Misi Pembangunan

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah



3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Adapun Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan selama periode perencanaan 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perumahan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2. Penyediaan Hunian sewa yang layak huni dan terjangkau 3. Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Formal Bersubsidi
Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan Kawasan Permukiman Kumuh 2. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Tanah Milik Pemerintah Daerah 2. Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemda



Tabel 2.2
Target Sasaran Strategis yang di tetapkan Dalam Renstra 2019-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	81,35	82,01	82,92	83,84	84,81	85,80	86,83	
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	57,66 Ha	0 Ha	21,49 Ha	11,05 Ha	11,74 Ha	13,38 Ha	0 Ha	
3	Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat	22,22	22,89	38,05	53,02	67,85	82,56	97,19	

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum

1. Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah
2. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
3. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Urusan Pertanahan

1. Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah

Sesuai hasil pemuktahiran program dan kegiatan ke Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan



Daerah, maka hasil pemampingan program yang dilaksanakan selama periode Renstra 2019 – 2024 untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1. Program Kawasan Permukiman**
- 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**
- 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Urusan Pertanahan

- 4. Program Penatagunaan Tanah**

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala OPD kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Polewali Mandar sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel. Sedangkan Tujuan Khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujudnya atas komitmen pemerintah bersama jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan



dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	83,40%
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	21 Ha
3	Meningkatkan Kualitas pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	53,02%
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik serta menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja
2. Akuntabilitas Keuangan

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA. Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran.

➤ Cara Pengukuran Capaian Kinerja

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$



➤ **Skala pengukuran dan predikat kinerja**

- Capaian Kinerja > 95 s.d. 100% = Sangat Berhasil
- Capaian Kinerja > 80 s.d. 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja > 50 s.d. 80% = Cukup Berhasil
- Capaian Kinerja < 50 = Tidak Berhasil
- Capaian diatas 100% masuk pada angka 100%
- Capaian dibawah 0% masuk pada angka 0%.

**LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Sebagai OPD yang melaksanakan Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Yang dilaksanakan melalui Tahapan :

1. Pengumpulan Data (Jumlah dan identitas warga negara yang berhak menerima, jumlah barang dan /atau jasa yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan serta Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan) ;
2. Perhitungan Kebutuhan (Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya) :



3. Penyusunan Rencana (Termuat Dalam RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya);
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan (Menyediakan barang/jasa dan sarana dan prasarana sesuai dengan standar tehknis SPM).

Tabel 3.1
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Penyediaan dan rehaibitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	100	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100	-

Alokasi dan Realisasi anggaran tahun 2021 di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berjumlah Rp. 0

Untuk Realisasi pencapaian SPM Tahun 2021 untuk dua (2) indikator adalah 0% (tidak ada bencana dan tidak ada kegiatan relokasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2021).



Tabel 3.2
Permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM

Masalah	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulit melakukan pendataan terkait bencana ➤ Belum ada skema lokasi aman untuk Rumah Layak Huni ➤ Alokasi anggaran minim dan terdampak refocusing anggaran pandemi covid ➤ Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah ➤ Penguatan Tim Penerapan SPM Se Kabupaten Polewali Mandar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri 90/2019. ➤ Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas sehingga capaian SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata ➤ Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu pada Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 050/3708/2020 ➤ Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM

Untuk pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut

Tabel. 3.3
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	%	83,40	87,80	105	Sangat berhasil
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	Ha	21	12,61	60,04	Cukup berhasil



1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat	%	53,02	39,49	74,48	Cukup berhasil
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Predikat	Sangat Baik			Dalam Penilaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A			Dalam Penilaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Predikat	WTP			Dalam Penilaian



Tabel. 3.4
Data Capaian Akhir Periode RENSTRA sebelumnya (2013-2018) dan
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 - 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Akhir Periode Renstra 2013 - 2018	Capain Tahun 2019			Capain Tahun 2020			Capain Tahun 2021		
			Baseline Data 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	%	81,35	82,01	82,12	100,94	82,92	82,75	99	83,40	87,80	105
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	Ha	57,66	0	12,56	1256	36,17	5,5	15,2	21	12,61	60,04
Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat	%	22,22	22,89	22,10	96,5	41,88	38,07	91	53,02	39,49	74,48
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Predikat	Baik	Baik	Baik	100	Baik	Bak	100	Sangat Baik		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	100	BB	BB	100	A		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP		



Adapun Capain Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : “Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”.

- Dengan indikator Kinerja : **“Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni”**

Sesuai dengan Sasaran Strategis Kabupaten Polewali Mandar yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 **“MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”**. Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan khususnya bidang Perumahan yang bertujuan meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tabel. 3.5
Capaian Sasaran Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS RPJMD :				
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN				
INDIKATOR SASARAN RPJMD :				
INDEKS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN				
SASARAN STRATEGIS I :				
Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	Persen	83,40	87,80	100,5

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja untuk sasaran strategis I Untuk Indikator Kinerja “Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni” untuk tahun 2021 sebesar 105%. Capaian ini didukung dari Anggaran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, Anggaran APBN melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat serta dukungan dari APBD Kabupaten serta tersedianya Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel. 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2019 s.d 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Akhir	Capain Tahun 2019				Capain Tahun 2020			Capaian Tahun 2021	
			Periode Renstra 2013 -2018	Baseline Data 2018	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	%	81,35	82,01	82,12	100	82,92	82,75	99	83,40	87,80	100,5

Sesuai dengan kondisi awal tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 4799 (82,75%), maka rencana target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni sebanyak 4590 Unit (83,40%) yang terdiri dari Anggaran DAK Perumahan dan Permukiman sebanyak 87 Unit dan Anggaran DAU sebanyak 122 unit. Dan dengan adanya bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sebanyak 190 Unit, **maka jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani untuk tahun 2021 sebanyak 390 unit, sehingga realisasi capaian indikator “Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni” untuk tahun 2021 87,80% atau 100,10%.**



Tabel 3.7
Jumlah Data Base Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2016-2021

Uraian	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Database RTLH	Unit	9225	8682	8007	6730	5899	4799
RTLH Tertangani	Unit	543	675	1277	831	1100	399
Jumlah RTLH Belum Tertangani	Unit	8682	8007	6730	5899	4799	4400

Tabel 3.8
Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2016-2021

Sumber Pembiayaan RTLH	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dana Alokasi Umum	Unit			26	61	3	122
Dana Alokasi Khusus	Unit	92	291	301	170	147	87
SNVT	Unit	451	384	500	600	950	190
Sumber Lain	Unit			450			
Jumlah	Unit	543	675	1277	831	1100	399

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I 2019-2021 dengan Target akhir
Periode Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Capaian				Target		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	81,35	82,12	82,75	83,49	84,81	85,80	86,83	

Dengan melihat capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Maka target Kinerja untuk akhir Periode Renstra (2024) diyakini akan tercapai. hal ini dapat



terlihat dengan adanya dukungan dari APBD Kabupaten serta bantuan dari SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Sasaran Strategis I

Pencapaian Indikator **Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni** untuk tahun 2021 dengan target sesuai Perjanjian Kinerja sebesar **83,40%** dan Realisasi sebesar **87,80%** dengan capain kinerja sebesar **100,5% (Sangat Berhasil)**.

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator
“Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni”

No	Keberhasilan	Kegagalan	Solusi
1.	Tersedianya data e-RTLH sehingga memudahkan Tenaga Fasilitator mendata dan menyeleksi calon penerima bantuan rumah swadaya	Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni yang belum terdata	Melakukan verifikasi Lapangan untuk memastikan kondisi rumah tidak layak huni sebelum dimasukkan kedalam e-RTLH
2	Pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis terhadap masyarakat calon penerima bantuan rumah swadaya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rumah yang layak huni	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan rumah swadaya
3	Adanya peningkatan anggaran dari DAU serta adanya partisipasi dari stake holder untuk membantu masyarakat penerima bantuan rumah swadaya	Menurunnya anggaran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman serta berkurangnya kuota penerima bantuan rumah swadaya dari SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Barat.	Menyediakan dana sharing untuk Anggaran DAK Perumahan dan Permukiman.



Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

1. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

a) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Jumlah Anggaran	Rp. 4.205.095.900,- Terdiri Dari
- Anggaran DAK	Rp. 1.812.596.000,-
- Anggaran DAU	Rp. 2.392.499.900,-
Realisasi Anggaran	Rp. 4.200.753.711,- (99.89%)

Untuk Anggaran DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman usulan Lokasi penerima bantuan sesuai dengan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada pada 2 Lokasi yaitu pada kawasan permukiman kumuh dan daerah afirmasi selain daerah transmigrasi , sehingga penanganan RTLH di Lokasi lain dibebankan pada Anggaran DAU dan SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selain menggunakan Tenaga (SDM) Tim Teknis dari Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan juga menggunakan tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang direkrut melalui seleksi. Yang diawali dengan tes tertulis dan wawancara. Tenaga Fasilitator bertugas melakukan verifikasi lapangan kepada masyarakat sebagai *calon penerima bantuan* dan mendampingi masyarakat sebagai *penerima bantuan rumah swadaya*. Penggunaan sumber daya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dimaksudkan agar proses pelaksanaan kegiatan bantuan rumah swadaya dapat berjalan lancar dan efisien, sehingga bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya.



2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

b) Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU

- **Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian** Dengan sumber anggaran DAU merupakan Kegiatan yang membantu masyarakat yang belum memiliki rumah (Penyediaan hunian sewa bagi masyarakat berpenghasilan).

Jumlah Anggaran Rp. 182.183.200,-

Realisasi Anggaran Rp. 182.160.100,- (99,9%).

Penyediaan Rumah susun sewa bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak 114 kamar. Dengan biaya sewa yang terjangkau. dalam hal pengelolaan Rusunawa terdiri dari Kepala Rusunawa dan Bendahara Rusunawa yang merupakan ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan dibantu oleh beberapa petugas yang diupah setiap bulan dengan sistem perjanjian kontak selama 1 (Tahun) yang terdiri dari : Petugas Administrasi, Petugas Keamanan, Petugas Instalator Listrik, Petugas Instalator Air, Petugas Kebersihan, Petugas Taman.

- **Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan**

Dengan sumber anggaran DAU merupakan Kegiatan membantu dan fasilitasi para pengembang (Developert) Perumahan Formal dalam penyediaan PSU di Perumahan Formal

Jumlah Anggaran Rp. 50.375.700,-

Realisasi Anggaran Rp. 50.334.000,- (99,99%)

Untuk tahun 2021 jumlah perumahan formal yang mendapat bantuan pembangunan PSU sebanyak 3 Unit yaitu :

2. Perumahan Al-ikhlas Residence Permai (Desa Patampanua, Kec. Matakali).



3. Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, kec. Wonomulyo).
4. Perumahan Graha Bumi Riskita Tandung (Desa Tandung Kec. Tinambung)

Tabel. 3.11
Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran
“Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni”

No	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Ket
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10	209 Unit	209 Unit	100%
2	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	25 Kamar	57 Kamar	228%
3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	3 Unit	3	100

Beberapa lokasi kegiatan Pembangunan RTLH dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan /Unit	Total Bantuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Kel. Darma	30 Unit	20.000.000	600.000.000	DAK
2	Desa Puccadi	29 Unit	20.000.000	580.000.000	
3	Desa Landi Kanusuang	28 Unit	20.000.000	560.000.000	
Jumlah DAK		87 Unit		1.740.000.000	
4	Kel. Pappang	9 Unit	17.500.000	157.500.000	DAU
5	Desa Kenje	6 Unit	17.500.000	105.000.000	
6	Desa Lagi Agi	1 Unit	17.500.000	17.500.000	
7	Desa Lapeo	4 Unit	17.500.000	70.000.000	
8	Kel. Mapilli	15 Unit	17.500.000	262.500.000	
9	Desa Tammajarra	1 Unit	17.500.000	17.500.000	



1	2	3	4	5	6
10	Desa Bala	4 Unit	17.500.000	70.000.000	DAU
11	Desa Tammangalle	11 Unit	17.500.000	192.500.000	
12	Desa Pambusuang	1 Unit	17.500.000	17.500.000	
13	Desa Galungtulu	2 Unit	17.500.000	35.000.000	
14	Desa Pallis	3 Unit	17.500.000	52.500.000	
15	Kel. Balanipa	1 Unit	17.500.000	17.500.000	
16	Desa Karama	2 Unit	17.500.000	35.000.000	
17	Kel. Lantora	3 Unit	17.500.000	52.500.000	
18	Kel. Pekkabata	3 Unit	17.500.000	52.500.000	
19	Kel. Madatte	12 Unit	17.500.000	210.000.000	
20	Kel. Manding	12 Unit	17.500.000	210.000.000	
21	Kel. Pelitakan	7 Unit	17.500.000	122.500.000	
22	Desa Patampanua	9 Unit	17.500.000	157.500.000	
23	Desa Mammi	7 Unit	17.500.000	122.500.000	
24	Desa Duampanua	9 Unit	17.500.000	157.500.000	
Jumlah DAU		122 Unit		2.135.000.000	
Grand Total		209 Unit		3.875.000.000	

Tabel 3.13
Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2020

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan /Unit	Total Bantuan (Rp)	Ket
1	Kel. Polewali	35 Unit	17.500.000	612.500.000	DAK
3	Kel. Sulewang	37 Unit	17.500.000	647.500.000	
4	Kel. Sidodadi	40 Unit	17.500.000	700.000.000	
5	Desa Kenje	35 Unit	17.500.000	612.500.000	
Jumlah DAK		147 Unit		2.572.500.000	
6	Kel. Lantora	1 Unit	17.500.000	17.500.000	DAU
7	Kel. Sidodadi	1 Unit	17.500.000	17.500.000	
8	Desa Arabua	1 Unit	17.500.000	17.500.000	
Jumlah DAU		3 Unit		52.500.000	
Grand Total		150 Unit		2.625.000.000	



Tabel 3.14
Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas rumah layak huni Tahun 2019

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan /Unit	Total Bantuan (Rp)	Ket
1	Kel. Darma	34 Unit	17.500.000	595.000.000	DAK
2	Kel. Madatte	34 Unit	17.500.000	595.000.000	
3	Kel. Manding	34 Unit	17.500.000	595.000.000	
4	Kel. Wattang	34 Unit	17.500.000	595.000.000	
5	Kel. Lantora	34 Unit	17.500.000	595.000.000	
Jumlah DAK		170 Unit		2.975.000.000	
6	Desa Pappandangan	16 Unit	15.000.000	240.000.000	DAU
7	Desa Pasiang	16 Unit	15.000.000	240.000.000	
8	Desa Bunga-Bunga	16 Unit	15.000.000	240.000.000	
9	Desa Tammangalle	6 Unit	15.000.000	90.000.000	
10	Desa Pallis	4 Unit	15.000.000	60.000.000	
11	Desa Karama	3 Unit	15.000.000	45.000.000	
Jumlah DAU		61 Unit		915.000.000	
Grand Total		231 Unit		3.890.000.000	

Tabel 3.15
Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas rumah layak huni Tahun 2018

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan /Unit	Total Bantuan (Rp)	Ket
1	Kel. Lantora	30 Unit	15.000.000	450.000.000	DAK
2	Kel. Pekkabata	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
3	Kel. Sulewatang	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
4	Kel. Madatte	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
5	Kel. Manding	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
6	Kel. Darma	31 Unit	15.000.000	465.000.000	
7	Kel. Wattang	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
8	Kel. Sidodadi	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
9	Desa Sidorejo	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
10	Kel. Tinambung	30 Unit	15.000.000	450.000.000	
Jumlah DAK		301 Unit			
11	Desa Bonde	3 Unit	7.500.000	22.500.000	DAU
12	Kel. Pappang	8 Unit	7.500.000	60.000.000	
13	Desa Panyampa	3 Unit	7.500.000	22.500.000	
15	Desa Pambusuang	1 Unit	7.500.000	7.500.000	
16	Desa Tammangalle	11 Unit	7.500.000	82.500.000	
Jumlah DAU		26 Unit		195.000.000	
Grand Total		327 Unit		4.710.000.000	



Berdasarkan ketiga tabel diatas (tabel 3.12 s/d tabel 3.15) bantuan penangan RTLH yang bersumber dari Anggaran DAK Perumahan dan Permukiman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2018 sebanyak 301 unit dengan anggaran Rp. 4.515.000.000, tahun 2019 sebanyak 170 unit dengan alokasi anggaran Rp. 2.975.000.000, untuk tahun 2020 sebanyak 147 unit dengan pagu Rp. 2.572.500.000, sedangkan untuk tahun anggaran 2021 jumlah bantuan 87 unit dengan pagu Rp. 1.74.000.000.

Selain melalui DAK Bidang Perumahan Permukiman dan Dana Alokasi Khusus (DAU) Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan program kegiatan bantuan stimulan rumah swadaya juga dilaksanakan oleh SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk tahun 2021 Kabupaten Polewali Mandar diberi bantuan sebanyak 190 Unit. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni
SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/Kel	Unit
1	Binuang	Kuajang	28
		Rea	27
4	Wonomulyo	Nepo	27
		Sidorejo	27
5	Mapilli	Ugi Baru	27
		Bonra	27
		Bonne-Bonne	27
		Jumlah	190



Tabel 3.17
*Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni
 SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020*

Tahap I			
No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Unit
1	2	3	4
1	Binuang	Mirring	20
		Amasangan	20
		Binuang	20
2	Anreapi	Anreapi	20
		Pappandangan	20
3	Matakali	Patampanua	30
		Bunga-Bunga	30
		Pasiang	30
4	Wonomulyo	Arjosari	20
		Campurjo	20
		Sumberjo	20
5	Tapango	Jambu Malea	25
		Banato Rejo	25
Jumlah			300
Tahap II			
No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Unit
1	Polewali	Darma	30
2	Luyo	Mambu	29
		Luyo	29
3	Campalagian	Lampoko	35
		Parappe	40
No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Unit
4	Balanipa	Bala	29
		Tammangalle	29
		Tamajarra	29
Jumlah			250
Tahap III			
No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Unit
1	Binuang	Mammi	30
		Batetangnga	20
		Tonyaman	20
2	Matakali	Matakali	20
		Tonrolima	20
		Indukmakkombang	20
		Barumbung	20
		Patampanua	20



1	2	3	4
3	Wonomulyo	Nepo	30
		Galeso	20
		Bakka-Bakka	20
4	Tapango	Tapango	20
		Dakka	20
		Riso	20
5	Campalagian	Lagi-agi	20
		Sumarrang	20
		Padang	20
		Lapeo	20
		Pappang	20
Jumlah			400

Tabel 3.18

*Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni
SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019*

No	Nama Desa/Kel	Jumlah Penerima	Keterangan
1	2	3	4
1	Desa Sidorejo	20 Unit	
2	Desa Bumiayu	20 Unit	
3	Desa Bumi Mulyo	16 Unit	
4	Desa Kebunsari	20 Unit	
5	Desa Sugihwaras	20 Unit	
6	Desa Sumberjo	16 Unit	
7	Desa Arjosari	20 Unit	
8	Desa Campurjo	20 Unit	
9	Desa Rumpa	20 Unit	
10	Desa Segerang	10 Unit	
11	Desa Bonra	20 Unit	
12	Desa Kurma	10 Unit	
13	Desa Beroangin	10 Unit	
14	Desa Rappang Barat	10 Unit	
15	Desa Karombang	14 Unit	
16	Desa Patambanua	14 Unit	
17	Desa Sepporraki	14 Unit	
18	Desa Pulliwa	14 Unit	
19	Desa Lenggo	14 Unit	
20	Desa Amola	14 Unit	
21	Kelurahan Amasangan	14 Unit	
22	Desa Batetangnga	14 Unit	



1	2	3	4
23	Desa Kuajang	14 Unit	
24	Desa Paku	14 Unit	
25	Desa Rea	14 Unit	
26	Desa Tonyaman	14 Unit	
27	Banato Rejo	10 Unit	
28	Desa Jambu Malea	10 Unit	
29	Desa Batu	10 Unit	
30	Desa Dakka	10 Unit	
31	Desa Riso	10 Unit	
32	Desa Tapango Barat	10 Unit	
33	Desa Tapango	10 Unit	
34	Desa Tapua	10 Unit	
35	Desa Mambu Tapua	10 Unit	
36	Kelurahan Anreapi	10 Unit	
37	Desa Katumbangan Lemo	20 Unit	
38	Desa Lapeo	10 Unit	
39	Desa Suruang	10 Unit	
40	Desa Lagi-Agi	10 Unit	
41	Desa Sabang Subik	20 Unit	
42	Desa Alu	30 Unit	
	Total Penerima	600 Unit	

Tabel 3.19

Daftar Lokasi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah layak Huni SNVT Penyedia Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima	Ket
1	Desa Karama	50	
2	Desa Tangnga-tangnga	50	
3	Desa Lekopadis	50	
4	Desa Batulaya	50	
5	Desa Galung Lombok	50	
6	Desa Buku	50	
7	Desa Ruppa	50	
8	Desa Bonde	50	
9	Desa Sugiwaras	50	
	Total Penerima	450	



Permasalahan yang sering dihadapi dalam Pencapaian Indikator Sasaran Strategis I:

1. Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
 - Hak Alas penerima bantuan yang tidak lengkap, sehingga bantuan dibatalkan dan akan diganti dengan calon penerima bantuan yang memiliki Hak Alas/ bukti kepemilikan lahan(Tanah) yang legal.
 - Masih kurangnya swadaya masyarakat sebagai penerima bantuan, sehingga kualitas rumah yang dibantu masih kurang layak.
 - Keterlambatan Penyaluran material karena Faktor cuaca dan Kondisi Jalan yang sedang dalam perbaikan.
 - Swadaya upah tukang kurang dipahami oleh penerima BSPS.
2. Penyediaan Rumah Susun Sewa Bagi MBR.
 - Luas Kamar yang berukuran kecil, sehingga mengurangi minat Masyarakat untuk tinggal di Rumah Susun.
 - Banyaknya Perumahan Subsidi, sehingga mindset Masyarakat lebih berkeinginan untuk melakukan Kredit Perumahan Subsidi daripada menyewa rumah susun.
3. Penyediaan dan pengelolaan perumahan formal.
 - Masih banyak Pengembang Perumahan Formal (Developert) yang belum menyerahkan asset PSU Ke Pemerintah Daerah yang merupakan syarat dalam pemberian bantuan PSU, sehingga pemberian bantuan pembangunan PSU tidak dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat.

Beberapa solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Indiktor Sasaran Strategis I :

1. Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
 - Memperkenalkan Aplikasi e-RTLH ke Masyarakat serta membagikan formulir pengisian data RTLH agar Data RTLH menjadi Valid.
 - Melaksanakan Kegiatan Pendataan dan verifikasi serta meminta kesiapan calon penerima dalam berswadaya sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan
 - Melakukan Monitoring secara berkala ke lokasi penerima bantuan
2. Penyediaan Rumah Susun Sewa Bagi MBR.
 - Menyediakan brosur rumah susun sewa untuk diberikan kepada setiap masyarakat



- Aktif memperkenalkan rumah susun sewa dalam setiap kegiatan yang dihadiri pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
3. Penyediaan dan pengelolaan perumahan formal.
- Melakukan sosialisasi kepada para Pengembang (Developert) Perumahan Formal agar segera menyerahkan asset PSU ke Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan Bidang Perumahan dalam melakukan pengusulan bantuan PSU ke Pemerintah Pusat



**Keadaan 0%
(Perspektif)**



Keadaan Minimal 30%



Keadaan Minimal 50%



Keadaan 100%



Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) An. RAHIMA Desa Landi Kanusuang Kec. Mapilli

**Keadaan 0%
(Perspektif)**



Keadaan Minimal 30%



Keadaan Minimal 75%



Keadaan 100%



Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) An. MASDAR Desa Landi Kanusuang Kec. Mapilli



Dokumentasi Kegiatan BSRS Tahun 2021



Penyerahan Buku Rekening secara Simbolis ke Penerima Bantuan



Monitoring Lapangan





Peresmian BSRS



Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Rusunawa



Pemeliharaan Rusunawa

Dokumentasi Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan perumahan formal



TAHUN 2021





PHO Pembangunan PSU Perumahan Formal



2. Sasaran Strategis II : “Meningkatnya kawasan permukiman yang layak”

- Dengan indikator Kinerja : **Luas Kawasan Kumuh**

Tabel. 3.20
Capaian Sasaran Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS RPJMD :				
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN				
INDIKATOR SASARAN RPJMD :				
INDEKS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN				
SASARAN STRATEGIS II :				
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Luas Kawasan Kumuh	Persen	21 Ha	28,8 Ha	50

Untuk tahun 2021 jumlah kawasan yang ditangani sebanyak 2 (Dua) kawasan yaitu Kawasan Koppe 4,52 Ha dan Kawasan Pandebassi 8,09 Ha dengan luas keseluruhan 12,61 Ha. melalui kegiatan pembangunan rabat beton di Kelurahan Darma dan Kelurahan Sulewatang serta adanya dukungan dari OPD lain untuk penanganan kawasan Dusun Manjopai Desa Karama.

Dari target yang direncanakan untuk Luas kawasan kumuh 21 ha dengan realisasi 14,1 Ha sehingga luas total luas kawasan kumuh 28,8 Ha (50%), tidak tercapainya target ini disebabkan kurangnya anggaran DAU karena adanya Covid-19.



Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II dapat kita lihat pada tabel berikut

*Tabel. 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2019-2021*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Akhir Periode Renstra 2013 - 2018	Capain Tahun 2019			Capain Tahun 2020			Capaian Tahun 2021		
			Baseline Data 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	Ha	57,6	57,6	45,1	21,78	36,17	42,9	25,52	21	28,8	50

Sesuai dengan tabel diatas penanganan tertinggi kawasan kumuh untuk tahun 2021 merupakan yang tertinggi dengan luas pengurangan sebesar ($42,9 - 28,8 = 14,1$ Ha), untuk tahun 2019 jumlah penanganan sebesar ($57,6 - 45,1 = 12,5$ Ha), Tahun 2020 sebesar ($45,1 - 42,9 = 2,2$ Ha)



Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II 2019-2020 dengan Target akhir Periode Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Capaian			Target		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas permukiman)	Luas Kawasan Kumuh	57,66	45,1 Ha	42,9 Ha	28,8 Ha	13,38 ha	0 Ha	0

Berdasarkan tabel diatas luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten untuk kondisi akhir 2021 seluas 28,8 Ha, sehingga dapat diprediksi bahwa penanganan kawasan kumuh menjadi 0 (Nol) untuk akhir periode RENSTRA tidak dapat dicapai.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Sasaran Strategis II

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang termuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada bagian d point 2.

Tabel. 3.23
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
2	Kawasan Permukiman	a Penetapan sistem kawasan permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
		b Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.		b Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.



Dan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman “Pasal I Ayat 13”

“Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dan ayat 14 “Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 2/PRT/M/2016 tentang Aspek dan Kriteria Kawasan Kumuh yaitu :

- 1. Kondisi Bangunan Gedung**
- 2. Kondisi Jalan Lingkungan**
- 3. Kondisi Penyediaan Air Minum**
- 4. Kondisi Drainase Lingkungan**
- 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah**
- 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan**
- 7. Kondisi Proteksi Kebakaran**

Berdasarkan Tujuh (7) aspek dan kriteria kawasan kumuh diatas, sehingga Pelaksanaan program dan kegiatan untuk indikator “*Luas Kawasan Kumuh*” dilakukan oleh beberapa OPD yang lain serta peran dari masyarakat dan pihak swasta. Sehingga perhitungan pencapaian/realisasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 624 Tahun 2020 Tentang PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.



*Tabel. 3.24
Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan di
Sesuai SK Bupati Polewali Mandar Nomor 624 Tahun 2020
Kabupaten Polewali Mandar*

No	Nama Lokasi	Luas	Lingkup Administratif		Ket
			Kel/Desa	Kec./Distrik	
1	Momba Batu - Batu	17.10	Darma	Polewali	Ringan
2	Koppe Kiri - kiri	27.08	Darma	Polewali	Ringan
3	Jambutua Pulele	21.86	Darma	Polewali	Ringan
4	Lantora Utama, Lantora Utara, Kalawa (Kalulu)	15.08	Lantora	Polewali	Ringan
5	Gernas	16.19	Madatte	Polewali	Ringan
6	Perumtel BTN Stadion	17.93	Madatte	Polewali	Ringan
7	Manding Langkogo Baru	14.96	Manding	Polewali	Ringan
8	Mambuliling Botto (Mabotto)	22.77	Polewali	Polewali	Ringan
9	Jami' Baru Tanro (Jabatan)	30.28	Polewali	Polewali	Ringan
10	Tirondo	5.20	Sulewatang	Polewali	Ringan
11	Patoke Pandebasse (Topande)	15.51	Sulewatang	Polewali	Ringan
12	Mangarampa Takatidung Pajala	15.51	Takatidung	Polewali	Ringan
13	Rea Jaya, Rea Barat, Sappoang, Bulubawang (Resoang)	35.85	Patampanua	Matakali	Ringan
14	Dusun IV Banua Baru	0.49	Banuabaru	Wonomulyo	Ringan
15	Lingkungan II Sidodadi	0.62	Sidodadi	Wonomulyo	Ringan
16	Lingkungan V Sidodadi	0.47	Sidodadi	Wonomulyo	Ringan
17	Lingkungan III Sidodadi	1.61	Sidodadi	Wonomulyo	Ringan
18	Lingkungan I Sidodadi	0.74	Sidodadi	Wonomulyo	Ringan
19	Dusun I Sugihwaras	0.60	Sugihwaras	Wonomulyo	Ringan
20	Dusun 4 Sugihwaras	1.27	Sugihwaras	Wonomulyo	Ringan
21	Dusun 5 Pasar Baru	1.09	Bonde	Campalagian	Ringan
22	Dusun Ujung Baru Kenje	1.99	Kenje	Campalagian	Ringan
23	Dusun Babbatoa Lapeo	3.80	Lapeo	Campalagian	Ringan
24	Dusun Ujung Timur Pappang	2.85	Pappang	Campalagian	Ringan
25	Dusun Kappungbaru Pappang	2.01	Pappang	Campalagian	Ringan
26	Dusun Karama	1.80	Karama	Tinambung	Ringan
27	Dusun Manjopai	1.48	Karama	Tinambung	Ringan
28	Dusun 2 Sepabatu	3.40	Sepabatu	Tinambung	Ringan
29	Dusun Ga'de	0.90	Tangnga- Tangnga	Tinambung	Ringan
	Total	280,22			

Dengan memperhatikan tabel 3.24 Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar, luas kawasan permukiman kumuh pada akhir tahun 2020 seluas 280,22 Ha. Yang berada



di Lima (5) Kecamatan Kota yaitu : Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Tinambung.

Khusus untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Untuk Kegiatan Pengelolaan sampah dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Dan beberapa aspek kawasan kumuh lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas terkait berdasarkan tugas dan fungsinya. **Sehingga dalam penetapan dan pengurangan kawasan kumuh dihitung secara bersama-sama oleh Pokja PKP dan Tim Program KOTAKU**

*Tabel 3.25
Baseline Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang menjadi target RPJMD*

KAWASAN KUMUH	Luas (Ha)		PENGURANGAN				SISA
			2019	2020	2021	Asumsi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
CAMPALAGIAN	11,7						
Bonde	1,1						
dusun 5 psr baru	1,1				1,1	0,0	
Kenje	2,0						
Dusun Ujungbaru	2,0					2,0	
Lapeo	3,8						
Dusun Babatoa	3,8					3,8	
Pappang	4,9						
dusun kampung baru	2,0					2,0	
Dusun Ujung Timur	2,9					2,9	
POLEWALI	32,5						
Darma	6,7						
Koppe	4,5			4,5	0,0	0,0	
Pulele	2,2		2,2	0	0	0,0	
Polewali	4,3						
Ujung	4,3	4,34				0,0	
Sulewatang	21,4						
Conggo_Sarabakan	8,2	8,2				0,0	
Pandebassi	8,0			8	0	0,0	
Tirondo	5,2					5,2	
TINAMBUNG	7,6						
Karama	3,3						
dusun karama	1,8					1,8	
Dusun Manjopai	1,5			1,5	0	0,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
Sepabatu	3,4						
dusun 2 sepabatu	3,4						3,4
Tangga-tangga	0,9						
dusun ga'de	0,9						0,9
WONOMULYO		5,8					
Banuabaru	0,5						
Dusun 4 Banuabaru	0,5						0,5
Sidodadi	3,4						
lingk 1 sidodadi	0,7					0,7	0,0
lingk 2 sidodadi	0,6					0,6	0,0
lingk 3 sidodadi	1,6						1,6
lingk 5 sidodadi	0,5					0,5	0,0
Sugiharwas	1,9						
dusun 1 sugiwaras	0,6					0,6	0,0
dusun 4 sugiwaras	1,3						1,3
JUMLAH	57,6	57,6	12,5	2,2	14,0	3,5	25,3

Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

Tabel 3.26
Sub Kegiatan yang mendukung Indikator : Luas Kawasan Kumuh

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (%)
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.096.081.000	1.063.404.110	94
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	446.081.000	419.919.110	94
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	446.081.000	419.919.110	94
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	650.000.000	643.485.000	99
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	650.000.000	643.485.000	99



- a. Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU. Kegiatan yang bertujuan mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan Jalan dan draenase di kawasan permukiman kumuh. Untuk tahun 2021 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan permukiman dilaksanakan di Dua (2) Lokasi yaitu di Kawasan Koppe Kelurahan Darma dan Kawasan Pandebassi Kelurahan Sulewatang.

Tabel. 3.27
Lokasi Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kel. Darma, kec. Polewali Kab. Polman	Kec. Polewali, kel. Darma	149.700.000,-	DAU
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kel. Sulewatang, kec. Polewali Kab. Polman	Kec. Polewali, kel. Sulewatang	149.295.000,-	DAU

Tabel. 3.28
Lokasi Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kel. Darma, kec. Polewali Kab. Polman	Kec. Polewali, kel. Darma	154.248.695,-	DAU
2	Pembangunan Jalan lingkungan kawasan Malaba Kel. Manding	Kec. Polewali, kel. Manding	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat
3	Pembangunan Jalan lingkungan Alli - Alli Kel. Takatidung	Kec. Polewali, Kel. Takatidung	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat
4	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Lingk. I Sidodadi Kel. Sidodadi	Kec. Wonomulyo, Kel. Sidodadi	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat



No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Lingk. II Sidodadi Kel. Sidodadi	Kec. Wonomulyo, Kel. Sidodadi	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat
6	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kawasan Malaba Kel. Manding	Kec. Polewali, Kel. Manding	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat
7	Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase Kawasan Ujung Kel. Polewali	Kec. Polewali, Kel. Polewali	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat
8	Pembangunan Jalan Lingkungan kawasan lingk. V Sidodadi Kel. Sidodadi	Kec. Wonomulyo, kel. Sidodadi	187.000.000,-	BKK Prov. Sulawesi Barat

- b. Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

Yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi isu mengenai pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat. RP3KP merupakan suatu “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah di sektor perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Sehingga dalam penyusunannya, dokumen RP3KP perlu berpedoman pada dokumen-dokumen kebijakan daerah yang mencakup perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah dengan tujuan dapat memenuhi kebijakan dan isu strategis yang belum terjawab pada dokumen perencanaan dan tata ruang dan sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman



Dokumentasi Pembangunan Jalan Rabat Beton Kel. Darma, Kec. Polewali



PERSIAPAN



50% (PELAKSANAAN PEKERJAAN)



100% (P H O)



PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON KEL. SULEWATANG



0% (SURVEY LOKASI)



50% (PELAKSANAAN PEKERJAAN)



100% (P H O)

TAHUN 2021



Permasalahan yang sering dihadapi dalam Pencapaian Indikator Sasaran Strategis II :

- a. Kurangnya Perhatian Masyarakat terhadap Permukiman yang mereka tempati sehingga Sarana dan Prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah tidak dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kembali kawasan permukiman kumuh.
- b. Sebagian besar masyarakatnya termasuk masyarakat prasejahtera yang punya penghasilan tidak tetap karena sebagian besar bekerja pada sektor informal seperti nelayan, buruh bangunan, tukang bontor, dan penjual kue. Sehingga hal ini membuat masyarakat setempat tidak bisa berbuat banyak apalagi peduli akan lingkungan sekitar.
- c. Ketidakteraturannya jarak bangunan hunian rumah sehingga mempersulit dalam memberikan ruang untuk pembangunan Jalan, MCK, Drainase.
- d. Tingkat kepadatan bangunan yang relatif tinggi dan kondisi fisik bangunan yang sebagian besar masih konstruksi non permanen khususnya pada kawasan kategori kumuh berat

Beberapa solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Sasaran Strategis II :

- a. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh dapat lebih terpantau dan terstruktur sesuai dengan aspek kekumuhan disetiap kawasan kumuh.
- b. Membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dimaksudkan sebagai organisasi masyarakat warga yang berpihak membantu kebutuhan masyarakat, khususnya yang terkait dengan kemiskinan. Di samping kehadirannya yang juga dimaksudkan sebagai lembaga yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambil keputusan yang kondusif bagi warga masyarakat,



BKM secara formal adalah lembaga kolektif yang merumuskan unsur-unsur strategis bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

- c. Melakukan kerjasama sama dengan pihak swasta khususnya pemberian CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan tanggung jawab Perusahaan dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Sasaran Strategis III : “Meningkatkan Kualitas pertanahan pemerintah daerah”

- Dengan Indikator Kinerja : **Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat.**

Luas Tanah Pemda untuk yang terdata untuk tahun 2020 seluas 6.801.270,45 M². Jumlah pengadaan tanah untuk tahun 2021 sebanyak 3 Bidang dengan luas 57.840 M², sehingga total luas tanah pemda untuk 2021 6.859.110,45 M² dengan luas tanah pemda yang bersertifikat untuk tahun 2020 seluas 2.588.935,48.M². untuk rencana capaian tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.29
Sasaran Strategs III

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatkan Kualitas pertanahan pemerintah daerah				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat.	Persen	53,02	39,49	74,48



Untuk tahun 2021 Rencana target “Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat” 53,02% dengan luas 4.662.736,10 M2, dengan realisasi seluas 2.708.727,48 M2 atau 39, 49% sehingga capaian kinerja 78,48%. **Tidak tercapainya target ini disebabkan adanya beberapa usulan pensertifikatan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Polewali Mandar yang yang masih dalam proses yang disebabkan dokumen yang belum lengkap.**



Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel. 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2019-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Akhir Periode Renstra 2013 - 2018	Capain Tahun 2019			Capain Tahun 2020			Capaian Tahun 2021		
			Baseline Data 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Meningkatkan Kualitas pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	%	22,22	22,89	22,10	96,5	41,88	38,07	91	53,02	39,49	74,48

Dengan memperhatikan tabel diatas 3.30. pencapaian tahun 2021 sebesar 74,48% adalah pencapaian terendah yang dicapai dalam 3 Tahun periode Renstra 2019 – 2023. Pencapaian ini didukung oleh adanya Data Base SIMDA BMD sehingga memudahkan dalam melakukan pensertifikatan tanah milik pemda.



Tabel 3.31
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III 2019-2020 dengan Target akhir Periode Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Capaian			Target		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		8	9	10
3	Meningkatkan Kualitas pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,22	22,89	38,07	39,49	67,85	82,56	97,19

Dengan melihat hasil yang dicapai untuk tahun ke 3 Periode Renstra 2019-2024 dengan capaian 39,49%, maka rencana target untuk tahun 2024 (akhir periode Renstra) dapat tercapai.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Sasaran Strategis III

Dengan adanya daftar rincian barang milik daerah (aset) tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang bersertifikat dan belum bersertifikat dalam Data Base SIMDA Bidang Aset Badan Keuangan yang memudahkan dalam melakukan inventarisasi dan pendataan lapangan untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat aset tanah milik pemda.

Sesuai hasil pendataan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa lokasi tanah milik pemda yang diklaim oleh oknum atau organisasi yang dapat menimbulkan konflik/sengketa, sehingga pengusulan untuk pensertifikatan mengalami hambatan karena lokasi tanah tersebut masih perlu diselesaikan terlebih dahulu. maka Bidang Pertanahan melakukan fasilitasi dengan oknum/organisasi yang melakukan klaim lokasi dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bidang Aset Badan Keuangan, Aparat Pemerintah Setempat, Tokoh Masyarakat serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Polewali Mandar.



Tabel 3.32
Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat
Keadaan 31 Desember 2021

No.	Unit / Opd	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Penggunaan	LOKASI	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	9
1	BIDANG PENGELOLA	Sawah Lain-lain		1996	Iddle		
2	BIDANG PENGELOLA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.344,00	2000	Dinas Koperasi dan UKM	Kel. Takatidung	
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.017,00	1980	Kantor Dinas Dukcapil	Kel. Pekkabata	
4	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	2005	Kantor Dinas Perhubungan	Kel. Pekkabata	
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Sawah Lain-lain	0,00	1996	Areal Sawah		Untuk UPTD Breeding Center
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	0,00	1997	Bangunan Kantor		Untuk Bangunan Rumah Dinas
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1954	Bangunan Kantor		Untuk Kantor Distanak
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1978	Bangunan Kantor		
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1978	Bangunan Kantor		
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1986	Bangunan Kantor		
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	35.479,00	2006	Kantor BPP Polewalo	Kel. Madatte	Tanah BPP Polewali
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.140,00	2007	Kantor BPP Mapilli		Tanah BPP Mapilli
13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.595,00	2009	Kantor BPP Anreapi		Tanah BPP Anreapi
14	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	644,00	2010	Kantor BPP Tinambung		Tanah BPP Tinambung
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Pembibitan	0,00	1990	Kantor UPTD Hortikultura		Untuk Kantor UPTD Hortikultura
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	0,00	1990	Kantor UPTD Pasar Hewan		Untuk UPTD Pasar Hewan
17	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.000,00	1982	Digunakan untuk tanah kantor BPP Tonyamang	Hibah	Tanah Kantor BPP Tonyamang Kec. Binuang
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,635,00	2020	Digunakan untuk Bangunan Kantor BPP Campalagian	Hibah	Tanah Bangunan Kantor BPP Campalagian
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kolam Air Tawar	36.371,50	2005	Kolam Pembibitan Air Tawar		Tanah BBI Sepong
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	2003	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan		Pembangunan Kantor Tempat Pelelangan Ikan



1	2	3	4	5	6	7	9
21	INSPEKTORAT KABUPATEN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	835,00	1983	Kantor Inspektorat		
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1985	Kantor Dinas DPPKB dan PPA		Sebelumnya tercatat di Pariwisata
23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.757,00	1999	Kantor Dinas Kominfo SP		Tanah Kantor KIPP
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1984	Kantor Dinas PUPR		
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1984	Kantor Dinas PUPR		
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.416,00	2011	Kantor Dinas PUPR		Dinas PU
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	726,24	2008	Kantor Dinas PUPR		UPTD Maloso Kiri
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	17.120,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Paku - Amola
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	39.240,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Amola - Tanete
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	44.640,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Batetangnga - Kaleok
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	29.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kanang - Biru
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sarampu - Tonyaman
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.040,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Salumandalang, Tonyaman
34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.944,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Cokrominoto, Polewali
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.870,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. RA Kartini, Polewali
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.045,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Durian, Polewali
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.946,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Mangundang, Polewali
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.125,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Bahari, Polewali
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.036,80	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Andi Tomming, Polewali
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.596,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Masjid Jami', Polewali
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.514,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Gunung Tamengundur, Polewali
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	15.962,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Darma - Sulewatang
43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	15.402,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Gunung Mambulilling, Polewali
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	994,30	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Ammana Wewang, Polewali



1	2	3	4	5	6	7	9
45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	632,40	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Bolu, Polewali
46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.300,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Kemakmuran Polewali
47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.932,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Andi Latanratu, Polewali
48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.715,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Cendrawasih , Polewali
49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.480,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Andi Mattalitti, Polewali
50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.872,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Manunggal, Polewali
51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.800,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Madatte - Basseang
52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	21.756,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Gatot Subroto, Polewali
53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.250,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Budiutomo, Polewali
54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.744,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. KH. Agussalim, Polewali
55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.965,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Dg. Mangimpung, Polewali
56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.910,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Matakali - Tabone
57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tabone - Basseang
58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.680,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Basseang - Anreapi
59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	38.553,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Matakali - Palitakan
60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.160,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Cappego - Banatorejo
61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.949,80	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Abdullah Umar, Wonomulyo
62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	26.880,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pelitakan - Riso
63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	15.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kurrak - Messawa
64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	24.240,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pelitakan - Rappang
65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.765,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rappang - Andau
66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.240,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galeso - Bumiayu
67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	36.400,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galeso - Mampie
68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.833,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Padi Unggul, Wonomulyo



1	2	3	4	5	6	7	9
69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.500,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Brawijaya, Wonomulyo
70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.575,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sidodadi - Bumiayu
71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.954,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galeso - Pucceda
72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.753,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Kapten Jumhana, Wonomulyo
73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.920,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pendidikan, Wonomulyo
74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	15.160,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Wonomulyo - Katapang
75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.360,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Bangun Karya, Wonomulyo
76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.960,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sugihwaras - Tulungagung
77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.590,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lampa - Rumpa
78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.514,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rumpa - Arjosari
79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.395,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mapilli - Tenggelang
80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	17.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tenggelang - Pessunan
81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sumarrang - Pessunan
82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.212,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pajallungan - Sumarrang
83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.268,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Parappe - Katumbangan
84	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	23.835,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Botto - Katumbangan
85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.376,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Harapan, Desa Bonde
86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.885,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bonde - Beruberu
87	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	23.765,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lapeo - Beruberu
88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	21.735,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Laliko - Suruang
89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lamasariang - Napo
90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.230,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Limboro - Napo
91	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.375,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Ammana Wewang, Tinmabung
92	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.300,40	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Daeng Rioso, Tinambung



1	2	3	4	5	6	7	9
93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tinambung - Karama
94	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.320,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Karama - Tammangalle
95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	26.600,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tapango - Palatta
96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	22.176,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Palatta - Tapua
97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.527,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sabura - Tapua
98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	68.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tapua - Katimbang
99	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.520,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Katimbang - Matangnga
100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	24.960,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Batupanga - Kurma
101	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	56.600,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Paopao - Padangmawalle
102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	34.195,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Padangmawalle - Patulang
103	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.410,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Padangmawalle - Robboang
104	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	34.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Robboang - Tapparang
105	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.920,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tonyaman - Lemo
106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.240,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sarampu - Kuajang
107	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.595,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Polewali - Mammi
108	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.700,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rea Timur - Kanang
109	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.640,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pokko - Sulewatang
110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.018,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sulewatang - Tirondo
111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.790,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pokko - Kunyi
112	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.283,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kumbang - Bendang
113	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.620,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kunyi - Batupiak
114	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.692,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kunyi - Bendang
115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.800,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lebani - Pappandangan
116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	21.480,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Anreapi - Pappandangan



1	2	3	4	5	6	7	9
117	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.098,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pappandangan - Kelapa Dua
118	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.640,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Basseang - Darma
119	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.300,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Basseang - Beluak
120	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.600,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tabone - Seppong
121	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.915,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Matakali - Seppong
122	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.960,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Labasang - Pelitakan
123	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	9.720,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pelitakan - Lemo
124	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.640,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pelitakan - Dakka
125	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.426,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mapilli - Katumbangan
126	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Katumbangan - Buku
127	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.520,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Parappe - Sengkae
128	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.235,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sengkae - Katumbangan
129	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.420,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lemo - Parabaya
130	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.001,20	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Masdar, Campalagian
131	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.872,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lampoko - Pangesoran
132	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.560,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kurma - Dakka
133	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.130,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kurma - Andau
134	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	30.160,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jambumalea - Tapango
135	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.720,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rappang - Bussu
136	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.720,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rappang - Tuttula
137	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.740,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pallatta - Mambu Tapua
138	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.570,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mambu Tapua - Kalosi
139	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	36.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Silasila - Sattokko
140	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.655,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lelo - Kanusuang



1	2	3	4	5	6	7	9
141	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.610,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mambu Tabbassala
142	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.930,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tabbassala - Kappungbaru
143	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.505,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Siratuang - Lagusi
144	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	17.560,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tenggelang - Luyo
145	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.840,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tenggelang - Kakkangan
146	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.775,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tenggelang - Tabbassala
147	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.575,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kakkangan - Lambepada
148	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.960,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pussui - Palungan
149	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.080,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Palungan - Jati
150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.260,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jati - Pendulangan
151	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.630,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pendulangan - Salarri
152	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.960,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Palungan - Tappingan
153	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	27.630,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sumarrang - Puambuttu
154	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	29.460,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Puambuttu - Pessunan
155	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.735,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galung Tuluk - Lambanan
156	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.560,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pambusuang - Lego
157	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.930,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tammangalle - Pallis
158	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.830,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pallis - Ongko
159	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.957,60	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tammangalle - Banualembang
160	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.370,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tammangalle - Mosso
161	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.380,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Karama - Lamasariang
162	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	9.275,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lamasariang - Pandebulawang
163	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.595,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pandebulawang - Napo
164	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.680,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kandemeng - Tanggatangnga
165	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.180,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kandeapi - Talolo



1	2	3	4	5	6	7	9
166	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Talolo - Tammajarra
167	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Talolo - Lemosusu
168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.150,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Renggeang – Tandassura
169	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.863,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tangan Baru - Parribuang
170	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.160,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tangan Baru - Saragian
171	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	17.880,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mombi - Sayoang
172	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.475,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Napo - Todangtodang
173	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	17.955,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Salujerre - Sinunu
174	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	57.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Ihing - Lenggo
175	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	38.400,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Timolo - Lenggo
176	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.705,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kallo - Timolo
177	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.930,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Alla - Kallo
178	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	46.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pallemboangan - Kallo
179	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	30.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pulliwa - Daala Timur
180	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.120,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bulo - Karombang
181	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	45.535,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kamande - Piriang
182	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	852,80	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galung Lombok - Tande
183	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.690,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Puppenga - Tande
184	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.100,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tubbi - Tamolengan
185	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.475,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Segerang - Bumiayu
186	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.625,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bumimulyo - Nepo
187	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	9.504,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Amassangan - Bajoe
188	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.085,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Paku - Tete
189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.375,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Paku - Tando



1	2	3	4	5	6	7	9
190	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.300,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Olah Raga, Polewali
191	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.640,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Tammajarra, Polewali
192	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.540,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Todilaling, Polewali
193	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.230,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Budaya, Polewali
194	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.490,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Tritura, Polewali
195	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.020,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Stadion , Polewali
196	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.050,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Belawa - Perumtel
197	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.196,60	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. DR Sutomo, Polewali
198	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.283,10	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pemuda, Polewali
199	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.907,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. KH Wahid Hasyim, Polewali
200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.884,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Langsat, Polewali
201	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.805,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pangu, Polewali
202	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.230,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Basiru, Polewali
203	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.311,30	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Ammana Pattolawali, Polewali
204	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.198,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pangnge, Polewali
205	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.052,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Cendana, Polewali
206	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	540,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pammarica, Polewali
207	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	496,10	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Cumi-Cumi, Polewali
208	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.320,90	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Wai Manurung, Polewali
209	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.713,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. KH. Muh. Saleh, Wonomulyo
210	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.343,20	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Mongisidi, Wonomulyo
211	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.205,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Gatot Subroto, Wonomulyo
212	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.832,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Kesadaran, Wonomulyo
213	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.008,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sidorejo - Bumiayu
214	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.725,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Tabri, Wonomulyo



1	2	3	4	5	6	7	9
215	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.236,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Muhammadiyah, Wonomulyo
216	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.584,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Raden Subakir, Wonomulyo
217	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.050,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lambelotong - Gattunggan
218	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.740,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Panggalo - Ongko Barat
219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.770,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Beru-Beru - Ongko Barat
220	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.733,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Beru-Beru - Limboro
221	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.685,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Oting - Tammajarra
222	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.774,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lambepada - Lamasariang
223	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.177,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Tomepayung, Tinambung
224	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.806,30	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Gatot Subroto, Tinambung
225	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.247,60	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pendidikan, Tinambung
226	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.113,20	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Cokroaminoto, Tinambung
227	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.065,90	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Sultan Hasanuddin, Tinambung
228	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	795,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Kartini, Tinambung
229	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	750,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Emmy Saellan, Tinambung
230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.500,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sepabatu - Para
231	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.608,20	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kekkes - Para
232	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.602,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lekopaddis - Talolo
233	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.520,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lekpaddis - Pasar Baru
234	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.532,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lemosusu - Lawarang
235	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.480,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Samasundu - Salarri
236	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.840,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Palece - Kappungbaru
237	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.560,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Banuabanua - Teppo
238	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.980,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bung - Coci
239	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.303,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Katitting - Kappungbaru



1	2	3	4	5	6	7	9
240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.235,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Katitting - Tande
241	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.840,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galungtulu - Bala
242	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.680,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Gonda - Labuang
243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.395,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Laliko - Purrukka
244	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.793,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Masjid Raya, Campalagian
245	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.560,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bonde - Parappe
246	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.445,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Ammana Maju, Campalagian
247	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.816,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Babbatoa Raya, Campalagian
248	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	544,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Cepa, Campalagian
249	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.286,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Bahari, Campalagian
250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	14.340,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Panyampa - Morro
251	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.160,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Galung - Paluddai
252	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.760,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Accole - Rumpa
253	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.068,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rumpa - Kebunsari
254	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.520,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Andi Maddarammang, Polewali
255	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.016,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tammangalle - Kappungbaru
256	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.720,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Jl. Pedukuhan
257	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.245,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rea Barat - Bulubawang
258	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.310,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lapejang - Panrengpanreng
259	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.760,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Panrengpanreng - Simbalatung
260	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.095,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lagusi - Salakka
261	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.520,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bakka-Bakka
262	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.518,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Beroangin - Salurihang
263	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.207,50	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mosso - Salujoleng
264	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.455,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pangesorang - Bungandui



1	2	3	4	5	6	7	9
265	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.960,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lambepanda - Salubolong
266	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.091,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tondo - Panuttungan
267	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	6.280,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rondongan - Galung
268	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.849,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Rondongan - Palluasan
269	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.392,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Mapilli Barat - Luyo
270	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.380,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pangesorang - Mambu
271	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.075,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lampa - Bonra
272	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	15.024,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bonra - Pareddeang
273	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.690,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kappungbaru - Lambague
274	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.240,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Sappoang - Tappina
275	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.750,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tapparang - Bulubulu
276	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	25.080,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lilli - Patambanua
277	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Patambanua - Mamasa
278	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.650,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bala - Palippis
279	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	13.560,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Bonde - Paccini
280	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	19.415,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Lampoko - Parappe
281	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.350,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Salurihang - Toppong
282	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	9.768,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Pallemboangan - Salujerre
283	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	10.800,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tubbi - Tanete
284	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.380,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tanete - Mariha
285	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.800,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Palatta - Babbatapua
286	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	20.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Banatorejo - Lapejang
287	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	29.680,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Riso - Kurrak
288	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	23.000,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tabassala - Lagusi
289	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	17.200,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tibung - Bulubulo



1	2	3	4	5	6	7	9
290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	9.600,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Tulungagung - Lamongan
291	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	18.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Salaka - Mukumuku
292	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	16.440,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Salaka - Pussui Barat
293	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.120,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Kalukaluku - Ratte
294	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.520,00	2015	Jalan Kabupaten		Tanah Jalan Ruas Batu - Babbatapua
295	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.948,00	2019	Jalan Kabupaten		
296	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	8.980,00	2019	Jalan Kabupaten		
297	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.240,00	2019	Jalan Kabupaten		
298	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.724,80	2019	Jalan Kabupaten		
299	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.452,50	2019	Jalan Kabupaten		
300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	896,00	2019	Jalan Kabupaten		
301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	391,00	2019	Jalan Kabupaten		
302	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.760,00	2019	Jalan Kabupaten		
303	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.750,00	2019	Jalan Kabupaten		
304	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.249,50	2019	Jalan Kabupaten		
305	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.785,00	2019	Jalan Kabupaten		
306	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.650,00	2019	Jalan Kabupaten		
307	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	591,50	2019	Jalan Kabupaten		
308	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	904,00	2019	Jalan Kabupaten		
309	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.148,00	2019	Jalan Kabupaten		
310	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.548,00	2019	Jalan Kabupaten		
311	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.628,90	2019	Jalan Kabupaten		
312	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	12.984,00	2019	Jalan Kabupaten		
313	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.341,50	2019	Jalan Kabupaten		
314	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.578,00	2019	Jalan Kabupaten		



1	2	3	4	5	6	7	9
315	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.993,50	2019	Jalan Kabupaten		
316	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.440,00	2019	Jalan Kabupaten		
317	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.838,00	2019	Jalan Kabupaten		
318	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	5.640,00	2019	Jalan Kabupaten		
319	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.650,50	2019	Jalan Kabupaten		
320	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.392,00	2019	Jalan Kabupaten		
321	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	23.550,00	2019	Jalan Kabupaten		
322	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.998,00	2019	Jalan Kabupaten		
323	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.380,50	2019	Jalan Kabupaten		
324	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.004,00	2019	Jalan Kabupaten		
325	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.384,00	2019	Jalan Kabupaten		
326	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.376,00	2019	Jalan Kabupaten		
327	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.520,00	2019	Jalan Kabupaten		
328	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.856,00	2019	Jalan Kabupaten		
329	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.355,00	2019	Jalan Kabupaten		
330	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	615,00	2019	Jalan Kabupaten		
331	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	840,00	2019	Jalan Kabupaten		
332	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	755,00	2019	Jalan Kabupaten		
333	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.272,00	2019	Jalan Kabupaten		
334	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	865,00	2019	Jalan Kabupaten		
335	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.177,60	2019	Jalan Kabupaten		
336	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.193,80	2019	Jalan Kabupaten		
337	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	679,40	2019	Jalan Kabupaten		
338	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.125,00	2019	Jalan Kabupaten		
339	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	787,50	2019	Jalan Kabupaten		



1	2	3	4	5	6	7	9
340	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	999,00	2019	Jalan Kabupaten		
341	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.180,90	2019	Jalan Kabupaten		
342	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	1.743,00	2019	Jalan Kabupaten		
343	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	3.792,00	2019	Jalan Kabupaten		
344	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	2.040,00	2019	Jalan Kabupaten		
345	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	7.680,00	2019	Jalan Kabupaten		
346	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.601,00	2019	Jalan Kabupaten		
347	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	11.130,00	2019	Jalan Kabupaten		
348	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Jalan	4.264,00	2019	Jalan Kabupaten		
349	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.070,00	1982	Kantor Dinas PEMDES		Tanah Bangunan Kantor BPMPD (Eks BKD)
350	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Bangunan Pasar	19.136,00	2012	Pasar Tinambung		
351	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Bangunan Pasar	3.200,00	2013	Pasar Tapango		
352	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Bangunan Pasar	10.800,00	2014	Pasar Binuang		
353	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Utk Bangunan Gd. Perdagangan Lain-lain	4.140,00	2014	Gudang		
354	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1991			Kantor Dinas Perindagkop dan UKM
355	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Bangunan Pasar	10.099,00	2019	Pasar	Pembelian	HASIL PENILAIAN BMD atas SK BUPATI NOMOR 782 TAHUN 2019 Tanggal 18 November 2019 (Temuan BPK 2018)
356	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Untuk Makam Umum	0,00	2018	Pemakaman Umum		
357	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Bangunan Pasar	0,00	2017	Pasar Campalagian		Pembelian untuk pasar
358	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Bangunan Olah Raga	0,00	2017	Stadion Mini Wonomulyo		Pembelian Tanah Untuk Sarana Umum Stadion Mini
359	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Jalan	1.667,00	2017	Fasilitas Umum		Sudah Termasuk SPPD Dalam dan Luar Daerah, Honor, Appraisal, ATK, Materai, Foto copy, Makan Minum
360	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.045,00	2019	Sekolah		
361	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	14.039,00	2019	masjid		



1	2	3	4	5	6	7	9
362	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	964,00	2019	Puskesmas		
363	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tanah Untuk Jalan Propinsi	22.507,00	2019	Jalan Umum		
364	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Kelurahan Anreapi	4.547,00	2020	Puskesmas Anreapi	Pembelian	Pengadaan Tanah Puskesmas Anreapi
365	SEKRETARIAT DAERAH	Makam Umum/Kuburan Umum	1.339,00	2012	Lokasi Perkuburan Kec. Anreapi		Lokasi Perkuburan Kec. Anreapi
366	SEKRETARIAT DAERAH	Makam Umum/Kuburan Umum	1.674,00	2014	Tanah Kebun		Lokasi Pekuburan Manding
367	SEKRETARIAT DAERAH	Makam Umum/Kuburan Umum	3.210,00	2011	Tanah Pekuburan Umum		Lokasi Perkuburan Mammi
368	SEKRETARIAT DAERAH	Makam Umum/Kuburan Umum	1.513,00	2011	Tanah Pekuburan Umum		Lokasi Perkuburan Bala
369	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	200,00	2011	Tapango		Lokasi Rumah Singgah
370	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	5.400,00	2008	Rusunawa		Tanah untuk pembangunan Rusunawa
371	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	7.936,00	2011			Lokasi Kawasan Budaya
372	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Industri Lainnya	6.100,00	2012	Relokasi Sub Station Kakao		Relokasi Sub Station Kakao
373	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	13.302,00	2016	kantor		
374	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	690,00	2008	Kantor KPU		Tanah yang digunakan untuk Kantor KPU
375	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	17.991,00	2010	Bangunan TPI		Tanah Tempat Pelelangan Ikan
376	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Jalan	0,00	2013	Akses Jalan Tutar		Akses Jalan Tutar
377	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Jalan	10.091,00	2015	Jalan		Tanah Jalan RA. Kartini
378	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Jalan	7.564,00	2016	Kantor		
379	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Lapangan Tennis	681,00	2010	Bangunan Lapangan Tennis		Tanah Lapangan Tennis Polewali
380	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.977,00	2010			Tanah Lapangan Bola Kurma Mapilli
381	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	1.400,00	2014	Alun-alun		Lokasi Alun Alun Kota Pekkabata
382	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.816,00	2015	SPAM		Tanah Bangunan SPAM Luyo
383	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Monumen	800,00	2011			Lokasi Pintu Gerbang Kota Tahap II
384	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.880,00	2008	SLB Wonomulyo	Pembelian	Digunakan oleh SLB Wonomulyo, Pelepasan hak Tanah Nomor 10/PHT/XII/2008
385	DINAS SOSIAL	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.460,00	1982	Kantor Dinas Sosial		Kantor Dinas Sosial



1	2	3	4	5	6	7	9
386	DINAS SOSIAL	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.788,00	1995	Balai Latihan Kerja		Tanah LBK (Loka Bina Karya) Sengketa. Harga NJOP pada tahun 1982 adalah Rp. 5,869/M2
387	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1993	Kantor Dinas Transnaker ESDM		
388	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Sakit	40.000,00	1987	RSUD Polewali		
389	DINKES	Sawah Lain-lain	0,00	1990	Kantor Dinas Kesehatan		Untuk UPTD Balai Benih Padi JL. Pengairan, kel. Sidodadi, Kec Wonomulyo - RS. Pratama Wonomulyo
390	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	640,00	1993	Instalasi Farmasi		
391	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Pengering	0,00	1990			Untuk UPTD Balai Benih Padi JL. Pengairan, kel. Sidodadi, Kec Wonomulyo - RS. Pratama Wonomulyo
392	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2005			Status Sengketa (Puskesmas Lama)
393	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2005			Pustu Petoosang
394	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2005	Polindes ALU		Polindes Allu
395	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2005	Poskesdes Puppuring		Poskesdes Puppuring
396	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2005	Poskesdes Pao-Pao		Poskesdes Pao-Pao
397	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2005	Poskesdes Kalumammang		Poskesdes Pao-Pao
398	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	195,00	2009	Poskesdes Saragiang		Poskesdes Saragiang
399	Puskesmas Allu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	88,00	2011	Poskesdes Sayoang		Poskesdes Sayoang
400	Puskesmas Anreapi	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	300,00	2007	Poskesdes Papandangan		Fisik dikuasai tapi Bukti Kepemilikan Tidak Ada
401	Puskesmas Anreapi	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	246,50	2010	Pustu Parateang		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
402	Puskesmas Anreapi	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	168,00	2006	Poskesdes Kelapa Dua		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
403	Puskesmas Anreapi	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	200,00	2006	Pustu Kunyi		
404	Puskesmas Batupanga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1989	Poskesdes Sambaliwali		
405	Puskesmas Batupanga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1989	Poskesdes Tenggelang		
406	Puskesmas Batupanga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	240,00	2010	POSKESDES MAMBU		POSKESDES MAMBU
407	Puskesmas Batupanga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	100,00	2011	POSKESDES PUCCADI		POSKESDES PUCCADI
408	Puskesmas Batupanga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	204,00	1992	PUSTU MAPILLI BARAT		PUSTU MAPILLI BARAT



1	2	3	4	5	6	7	9
409	Puskesmas Batupanga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	202,00	2009	PUSTU LUYO		PUSTU LUYO
410	Puskesmas Binuang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120,00	2010	Poskesdes Pulo Tangnga		Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu
411	Puskesmas Binuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1990	Poskesdes Amola		
412	Puskesmas Binuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1990	Poskesdes Bajoe		
413	Puskesmas Binuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1990	Polindes Mirring		
414	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	80,00	2008	Poskesdes Sabura		
415	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	80,00	2010	Poskesdes Daala Timur		
416	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	80,00	2010	Poskesdes Sepporaki		
417	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	120,00	2010	Poskesdes Karombang		
418	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	80,00	2010	Poskesdes Ihing		
419	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	80,00	2010	Poskesdes Lenggo		
420	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	80,00	2011	Poskesdes Pulliwa		
421	Puskesmas Bulo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	120,00	2013	Poskesdes Patambanua		
422	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	323,00	1997	Pustu Suruang		
423	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	171,00	2003	Pustu Ongko		
424	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	201,00	2003	Pustu Sumarrang		
425	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	124,00	2003	Poskesdes Parappe		
426	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	136,00	2012	Poskesdes Batusasi		
427	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	141,00	2012	Poskesdes Lapeo		
428	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	136,00	2012	Poskesdes Padang		
429	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	2012	Poskesdes Padang Timur		
430	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	152,00	2012	Poskesdes Lampoko		
431	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	164,00	2012	Poskesdes Lagiagi		
432	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	151,00	2012	Poskesdes Pappang		
433	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	169,00	2013	Poskesdes Laliko		



1	2	3	4	5	6	7	9
434	Puskesmas Campalagian	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	151,00	2014	Poskesdes Kenje		
435	Puskesmas Katumbangan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	153,00	2007	Poskesdes Lemo		Poskesdes Lemo
436	Puskesmas Katumbangan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	2007	Polindes Botto		Polindes Botto
437	Puskesmas Katumbangan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	178,50	2011	Poskesdes Gattungan		Poskesdes Gattungan
438	Puskesmas Katumbangan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	213,12	2011	Pustu Panyampa		Pustu Panyampa
439	Puskesmas Kebunsari	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	204,00	2013	Pustu		
440	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	219,00	1983	Pustu Lembang-Lembang		
441	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	178,00	1992	Pustu Samasundu		
442	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	226,00	1992	Pustu Napo		
443	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	140,00	1992	Poskesdes Renggeang		
444	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	225,00	1992	Pustu Tandassura		
445	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	108,00	2007	Poskesdes Tangan Baru		
446	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	150,00	2007	Poskesdes Pendulangan		
447	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	223,00	2007	Poskesdes Salarri		
448	Puskesmas Limboro	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	132,00	2010	Pustu Todang-Todang		
449	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
450	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
451	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
452	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
453	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
454	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
455	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1992			
456	Puskesmas Mapilli	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	300,00	2010	Poskesdes Bonra		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
457	Puskesmas Massenga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	777,75	2007			
458	Puskesmas Matakali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	195,00	1995	Pustu Tonrolima		



1	2	3	4	5	6	7	9
459	Puskesmas Matakali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	750,00	1999	Pustu Indumakkombong		
460	Puskesmas Matakali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	150,00	2002	Pustu Barumbung		
461	Puskesmas Matakali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.315,35	2002	Poskesdes Bunga-Bunga		
462	Puskesmas Matakali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	450,00	2002	Poskesdes Matakali		
463	Puskesmas Matakali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	12,00	2006	Pustu Patampanua		
464	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	180,00	2005	Pustu Lilli		
465	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	96,00	2005	Poskesdes Rangoan		
466	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	270,00	2007	Poskesdes Tapua		
467	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	48,00	2010	Poskesdes Ba'ba Tapua		
468	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	120,00	2010	Poskesdes Mambu Tapua		
469	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	170,00	2013	Poskesdes Katimbang		
470	Puskesmas Matangnga	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.400,00	2014	Perumahan Dinas		
471	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Gedung	144,00	1986	Poskesdes Sabang Subik		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
472	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Gedung	177,00	2008	Poskesdes Bala		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
473	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Gedung	153,00	2010	Poskesdes Pallis		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
474	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Gedung	101,37	2008	Puskesmas Pambusuang		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
475	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Gedung	99,19	2008	Puskesmas Pambusuang		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
476	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	249,75	1990	Pustu Balanipa		Pustu Balanipa
477	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	286,00	1990	Pustu Tammejarra		Pustu Tammejarra
478	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	234,00	1990	Pustu Tammangalle		Pustu Tammangalle
479	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	264,00	1990	Pustu Mosso		Pustu Mosso
480	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	96,00	1990	Poskesdes Galung Lego		Pustu Lego
481	Puskesmas Pambusuang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	252,00	1990	Poskesdes Lambanan		Poskesdes Lambanan
482	Puskesmas Pekkabata	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	152,40	2008	Tanah Poskesdes Manding		Tanah Poskesdes Manding
483	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1980	Poskesdes Dakka		Poskesdes Dakka



1	2	3	4	5	6	7	9
484	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1980	Poskesdes Palatta		Poskesdes Palatta
485	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	224,00	1975	Pelayanan Kesehatan		Kurrak
486	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	181,00	1999	Pelayanan Kesehatan		Kalimbua
487	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	900,00	2007	Pelayanan Kesehatan		Bussu
488	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	275,00	2010	Pelayanan Kesehatan		Tuttula
489	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	150,00	2010	Pelayanan Kesehatan		Tapango Barat
490	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	60,00	2011	Pelayanan Kesehatan		JambuMalea
491	Puskesmas Pelitakan	Tanah Bangunan Poliklinik	350,00	2013	Pelayanan Kesehatan		BanateRejo
492	Puskesmas Polewali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.715,00	1992	Puskesmas Polewali		Puskesmas Polewali
493	Puskesmas Polewali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	315,00	1995	Pustu Pulo Battoa		Pustu Pulo Battoa
494	Puskesmas Polewali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	152,00	2005	Pustu Mammi		Pustu Mammi
495	Puskesmas Polewali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	190,00	2006	Pustu Kuajang		Pustu Kuajang
496	Puskesmas Polewali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	210,00	2010	Poskesdes Kayu Ranni		Poskesdes Kayu Ranni
497	Puskesmas Polewali	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	310,00	2011	Polindes Tonyaman		Polindes Tonyaman
498	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	287,00	1982	Pustu Karama		
499	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	285,00	1982	Pustu Sepabatu		Tanah Pustu Sepabatu sudah tidak digunakan
500	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	236,00	1982	Pustu Tandung		
501	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	286,70	1982	Pustu Galung Lombok		
502	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	335,78	2005	Tanah Poskesdes Tangnga'2		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
503	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	187,00	2010	Tanah Poskesdes Lekopadis		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
504	Puskesmas Tinambung	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	211,20	2010	Tanah Poskesdes batulaya		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
505	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	240,00	2011	Poskesdes Ratte		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
506	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	252,00	2011	Poskesdes Arabua		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
507	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	225,00	2012	Pustu Taloba		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
508	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	130,00	2012	Poskesdes Poda-poda		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
509	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	168,00	2013	Poskesdes Besoangin Utara		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada



1	2	3	4	5	6	7	9
510	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	120,00	2014	Poskesdes Besoangin		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
511	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	170,00	2014	Poskesdes Taramanu Toa		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
512	Puskesmas Tubbi Taramanu	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	240,00	1987	Poskesdes Poda-poda		
513	Puskesmas Wonomulyo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1982	Poskesdes Mampie		
514	Puskesmas Wonomulyo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0,00	1982	Poskesdes Bakka - Bakka		
515	Puskesmas Wonomulyo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.910,00	1982	Puskesmas Wonomulyo		
516	Puskesmas Wonomulyo	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	470,60	2011	Poskesdes Campurjo		Fisik/dikuasai/dan/bukti/kepemilikan/ada
517	CABDIS ALLU	Tanah Bangunan Gedung	1.284,00	2002	Gedung kelas, kantor , ruang guru, perpustakaan		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
518	CABDIS ALLU	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	735,00	2008	SDN 006 Puppuuring		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
519	CABDIS ALLU	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.100,00	2008	SDN 033 Malimbung		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
520	CABDIS ALLU	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	6.000,00	2011	Bangunan		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
521	CABDIS ANREAPI	Tanah Bangunan Gedung	15,17	1984	Untuk Bangun Gedung Sekolah		Tanggal Surat Hibah 22 Januari 2007
522	CABDIS ANREAPI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.296,00	1997	Bangunan Sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
523	CABDIS ANREAPI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	625,00	2007	TK Pembina Basseang		Keterangan Hibah
524	CABDIS BALANIPA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	586,00	1977	Gedung Kantor UPTD		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
525	CABDIS BALANIPA	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.750,00	1981	SDN NO.063 INP. SAWANG		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
526	CABDIS BALANIPA	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.124,00	1987	Sekolah		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
527	CABDIS BINUANG	Tanah Bangunan Gedung	1.500,00	1980	Untuk Bangunan Sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
528	CABDIS BINUANG	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	800,00	2007	TK Pembina Sarampu		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
529	CABDIS BINUANG	Tanah Bangunan Gedung	56,00	2014	Untuk Pembangunan		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
530	CABDIS BINUANG	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	7.041,00	2003	Tanah SMP Negeri Pasang		



1	2	3	4	5	6	7	9
531	CABDIS BULO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1,80	1984	SDN 071 Inp. Lenggo		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
532	CABDIS BULO	Tanah Bangunan Gedung	1.350,00	1998	SMPN SATAP LENGGO		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
533	CABDIS BULO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	10.000,00	2006	SEKOLAH		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
534	CABDIS BULO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	0,00	1983	Bangunan sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
535	CABDIS CAMPALAGIAN	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.630,00	1995	Bangunan sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
536	CABDIS CAMPALAGIAN	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.500,00	2007	TK PEMBINA PAPPANG CAMPALAGIAN		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
537	CABDIS CAMPALAGIAN	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	80,00	2015	TK NEGERI PEMBINA SURUANG		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
538	CABDIS LIMBORO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	0,00	1980	Sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
539	CABDIS LIMBORO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.021,00	1990	SDN 008 CAMBA-CAMBA		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
540	CABDIS LIMBORO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.656,00	1991	Untuk Bangunan Sekolah		
541	CABDIS LIMBORO	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.408,00	2003	Bangunan Kantor		Bekas Kantor Kecamatan Limboro
542	CABDIS LIMBORO	Tanah Bangunan Gedung	1.788,00	2005	SDN 017 NAPO		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
543	CABDIS LIMBORO	Tanah Bangunan Gedung	2.500,00	2012	Bangunan Sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
544	CABDIS LUYO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	300,00	2007	Sekolah tk Pembina Mapilli Barat		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
545	CABDIS MAPILLI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	5.191,00	1964	SDN 016 INP. UGI BARU		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
546	CABDIS MAPILLI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2,50	1995	Pendidikan		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
547	CABDIS MAPILLI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	150,00	2007	Bangunan sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
548	CABDIS MAPILLI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.768,00	2014	SD NEGERI SIKKA		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada



1	2	3	4	5	6	7	9
549	CABDIS MATAKALI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	160,00	2010	Pembuatan Sekolah		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
550	CABDIS MATANGNGA	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	0,00	2007	TK Pembina Matangnga		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
551	CABDIS POLEWALI	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	945,00	1959	Bangunan Sekolah		Fisik dikuasai pihak lain, tetapi bukti kepemilikan ada
552	CABDIS POLEWALI	Tanah Bangunan Gedung	1.500,00	1996	Kantor		
553	CABDIS POLEWALI	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	2.000,00	1996	TK PEMBINA POLEWALI		
554	CABDIS POLEWALI	Tanah Bangunan Gedung	1.860,00	2005	Sarana Sekolah		
555	CABDIS TAPANGO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.500,00	1983	Pendidikan		Fisik dikuasai pihak lain, tetapi bukti kepemilikan ada
556	CABDIS TAPANGO	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	357,00	2007	Bangunan Sekolah		Sudah ada surat hibah, tetapi belum disertifikatkan
557	CABDIS TINAMBUNG	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.000,00	1976	SDN 038 Karama		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
558	CABDIS TINAMBUNG	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.200,00	1984	SDN 062 INP. SANDANGAN		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
559	CABDIS TINAMBUNG	Tanah Bangunan Gedung	650,00	1992	bangunan kantor		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
560	CABDIS TINAMBUNG	Tanah Bangunan Gedung	11.900,00	1994	SMP Negeri 5 Tinambung		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
561	CABDIS TINAMBUNG	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	10.000,00	1998	SMPN 4 TINAMBUNG		
562	CABDIS TUTAR	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.000,00	1983	SDN 040 INPRES BUNU		Fisik dikuasai dan bukti kepemilikan ada
563	CABDIS TUTAR	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	0,00	2004	SMPN 1 PADANG MAWALLE		
564	CABDIS TUTAR	Tanah Bangunan Gedung	3.500,00	2010	Untuk Bangunan Sekolah		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada
565	CABDIS TUTAR	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.620,00	2011	SDN 009 LOMBOK		
566	CABDIS WONOMULYO	Tanah Bangunan Gedung	875,00	1982	KANTOR CABDIS PENDIDIKAN WONOMULYO		Fisik dikuasai tetapi bukti kepemilikan tidak ada



1	2	3	4	5	6	7	9
567	CABDIS WONOMULYO	Tanah Bangunan Gedung	600,00	1988	TK PEMBINA SIDODADI		
568	Kecamatan Balanipa	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1982	Kantor Lurah Balanipa		
569	Kecamatan Polewali	Tanah Perkuburan Islam	0,00	1990	Kantor Lurah Darma		
570	Kecamatan Polewali	Tanah Lapangan Sepak Bola	0,00	1990	Kantor Lurah Darma		
571	Kecamatan Polewali	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	405,00	2001	Kantor Lurah Lantora		Kantor Lama
572	Kecamatan Limboro	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1978	Kantor Lurah Limboro		Tanah dalam proses sengketa
573	Kecamatan Polewali	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	190,00	2001	Kantor Lurah Manding		
574	Kecamatan Matangnga	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1985	Kantor Lurah Matangnga		
575	Kecamatan Campalagian	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	1985	Kantor Lurah Pappang		
576	Kecamatan Polewali	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	2002	Kantor Lurah Pekkabata		
577	Kecamatan Allu	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	396,00	2000	Lokasi Kantor Desa Allu		Petoosang
578	Kecamatan Polewali	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	207,00	2014	Kantor Lurah Wattang		
579	Kecamatan Wonomulyo	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0,00	2002	Kantor Camat Wonomulyo		Kantor Baru Kecamatan Wonomulyo (Belum Tercatat)
580	Kecamatan Tinambung	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0,00	2020	Lahan Pekuburan	Pembelian	Digunakan untuk Lahan Pekuburan
581	Kelurahan Anreapi	Tanah Lapangan Sepak Bola	5.604,00	2020	Tanah Lapangan Sepak Bola	Hibah	Tanah Lapangan Sepak Bola Kel. Anreapi
582	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	364,00	2005	asrama		asrama putra
583	Kecamatan Polewali	Tanah Lapangan Sepak Bola	7.414,00	1994	Lapangan Sepak Bola	Hibah	Lapangan sepak bola (di belakang CADIKA)
584	Kecamatan Campalagian	Tanah Lapangan Sepak Bola	10.800,00	1971	Lapangan Gasrat	Pembelian	Digunakan Lapangan Gasrat Bonde, Kecamatan Campalagian.
585	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.166,10	1993	BANGUNAN KANTOR SAMSAT LAMA	Hibah	LAHAN KANTOR SAMSAT LAMA ,SEKARANG DIBANGUN RUMAH PRODIKSI DISPERINDAG
586	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	680,00	1993	LAHAN KANTOR KONI POLMAN	Hibah	KANTOR KONI (PROSES PINJAM PAKAI KE POLISI MILITER)
587	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
588	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
589	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan pen
590	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi



1	2	3	4	5	6	7	9
591	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
592	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi
593	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
594	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Lain-lain					Penyediaan Biaya Pendamping DAK bid.Irigasi
595	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain					JARINGAN IRIGASI DESA LAMPOKO KEC. CAMPALAGIAN
596	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain					PEMBANGUNAN IRIGASI DESA BOTTO KEC. CAMPALAGIAN
597	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain					PEMBANGUNAN IRIGASI DUSUN MANU-MANUKAN
598	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain					PEMBANGUNAN IRIGASI DESA BOTTO KEC. CAMPALAGIAN
599	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain					JARINGAN IRIGASI DESA KATUMBANGAN KEC.CAMPALAGIAN

Sesuai data pada tabel 3.32 diatas, jumlah bidang tanah milik pemda yang belum bersertifikat seanyak 599 bidang. Maka tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melalui bidang pertanahan akan melakukan pendataan untuk melengkapi dokumen masing – masing bidang tanah agar dapat segera mensertifikatkan tanah milik pemda tersebut.

Adapun aset tanah milik Pemda yang telah bersertifikat seuai keadaan per tanggal 31 Desember 2021, dapat kita lihat pada tabel berikut.



Tabel. 3.33
Data Luasan Tanah Milik Pemda Bersertifikat Sampai Tahun 2021

No	KECAMATAN	LUAS TANAH (M2)	LUAS TANAH (Ha)
1	POLEWALI	679.823,00	67,98
2	BINUANG	98.190,00	9,82
3	ANREAPI	43.021,00	4,30
4	MATAKALI	96.235,00	9,62
5	WONOMULYO	201.755,24	20,18
6	TAPANGO	70.160,00	7,02
7	MAPILLI	872.204,00	87,22
8	LUYO	85.842,93	8,58
9	CAMPALAGIAN	121.024,49	12,10
10	BALANIPA	65.182,00	6,52
11	TINAMBUNG	102.494,93	10,25
12	LIMBORO	34.652,00	3,47
13	BULO	32.862,00	3,29
14	TUTAR	120.904,00	12,09
15	ALU	47.217,00	4,72
16	MATANGNGA	33.544,89	3,35
17	LUAR KABUPATEN	3.615,00	0,36
JUMLAH		2.708.727,48	270,87

Tabel. 3.34
Data Luasan Tanah Milik Pemda Bersertifikat Sampai Tahun 2020

No	KECAMATAN	LUAS TANAH (M2)	LUAS TANAH (Ha)
1	POLEWALI	674,261.00	67.43
2	BINUANG	77,490.00	7.75
3	ANREAPI	38,176.00	3.82
4	MATAKALI	89,446.00	8.94
5	WONOMULYO	147,180.24	14.72
6	TAPANGO	69,070.00	6.91
7	MAPILLI	872,204.00	87.22
8	LUYO	85,616.93	8.56
9	CAMPALAGIAN	119,200.49	11.92
10	BALANIPA	60,237.00	6.02
11	TINAMBUNG	88,283.93	8.83
12	LIMBORO	34,652.00	3.47
13	BULO	32,862.00	3.29
14	TUTAR	115,879.00	11.59
15	ALU	47,217.00	4.72
16	MATANGNGA	33,544.89	3.35
17	LUAR KABUPATEN	3,615.00	0.36
JUMLAH		2,588,935.48	258.89



Tabel 3.35
Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019

No	KECAMATAN	LUAS TANAH (M2)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	POLEWALI	673,495	
2	BINUANG	63,410	
3	ANREAPI	29,387	
4	MATAKALI	89,446.00	
5	WONOMULYO	145,559.24	
6	TAPANGO	69,070.00	
7	MAPILLI	872,204.00	
8	LUYO	85,616.93	
9	CAMPALAGIAN	119,200.49	
10	BALANIPA	60,237.00	
11	TINAMBUNG	88,283.93	
12	LIMBORO	34,652.00	
13	BULO	29,369.00	
14	TUTAR	115,879.00	
15	ALU	47,217.00	
16	MATANGGA	33,544.00	
17	LUAR KABUPATEN	3,615.00	
	JUMLAH	2,560,186.47	

Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis III dapat kita lihat pada table berikut :

Tabel. 3.36
Program dan Kegiatan Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.724.127.957	1.623.322.305	99
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparaannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	1.724.127.957	1.623.322.305	99
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.624.128.257	1.623.322.305	99
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	99.999.700	98.706.230	99



1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

dasar dalam pelaksanaan pengadaan ganti tanah untuk pembangunan. Yang dimulai dari survey dan pengecekan lokasi, sosialisasi dengan pemilik lokasi dan penyediaan jasa lembaga jasa penilai publik (appraisal). Serta melakukan biaya ganti rugi serta untuk melakukan inventarisasi lokasi milik pemda.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan yang bertujuan melengkapi berkas/dokumen setiap asset tanah milik pemda untuk pengusulan sertifikat Hak Pakai Instansi (HPI) dan fasilitasi sengketa lahan (tanah) milik Pemda.

Tabel. 3.37

Daftar Usulan Pensertifikatan Hak Pakai Instansi (HPI)
Tahun 2021

No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUNTUKAN
1	Campalagian	Botto	BPP Campalagian
2	Campalagian	Kenje	TPU Kenje
3	Campalagian	Suruang	Pustu
4	Campalagian	Ongko	Pustu
5	Campalagian	Sumarrang	Pustu
6	Campalagian	Parappe	Poskesdes Parappe
7	Campalagian	Sumarrang	Poskesdes Batusasi
8	Campalagian	Lapeo	Poskesdes
9	Campalagian	Padang	Poskesdes
10	Campalagian	Padang Timur	Poskesdes Padang Timur
11	Campalagian	Lampoko	Poskesdes Lampoko
12	Campalagian	Lagiagi	Poskesdes Lagiagi
13	Campalagian	Pappang	Poskesdes Pappang
14	Campalagian	Laliko	Poskesdes Laliko
15	Campalagian	Kenje	Poskesdes Kenje
16	Campalagian	Katumbangan Lemo	Poskesdes Lemo
17	Campalagian	Botto	Polindes Botto
18	Campalagian	Gattungang	Poskesdes Gattungang
19	Campalagian	Panyampa	Pustu Panyampa
20	Campalagian	Sumarrang	Bangunan Sekolah
21	Campalagian	Pappang	TK Pembina Pappang
22	Campalagian	Pappang	Kantor Lurah Pappang
23	Tapango	Kel. Pelitakan	Jalan Kabupaten
24	Tapango	Kel. Pelitakan	Jalan Kabupaten



No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUNTUKAN
25	Tapango	Kel. Pelitakan	Jalan Kabupaten
26	Tapango	Kel. Pelitakan	Jalan Kabupaten
27	Tapango	Kel. Pelitakan	Pasar Tapango
28	Tapango	Kel. Pelitakan	Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
29	Tapango	Kel. Pelitakan	Rumah Singgah
30	Tapango	Dakka	Poskesdes Dakka
31	Tapango	Palatta	Poskesdes Palatta
32	Tapango	Kalimbua	Pelayanan Kesehatan
33	Tapango	Bussu	Pelayanan Kesehatan
34	Tapango	Tuttula	Pelayanan Kesehatan
35	Tapango	Tapango Barat	Pelayanan Kesehatan
36	Tapango	Jambu Malea	Pelayanan Kesehatan
37	Tapango	Batu	Bangunan Sekolah (SD Neg. 056 Inp. Wonosari)
38	Wonomulyo	Nepo	Jalan Kabupaten
39	Wonomulyo	Tumpiling	Jalan Kabupaten
40	Wonomulyo	Tumpiling	Jalan Umum
41	Wonomulyo	Campurjo	Jalan Kabupaten
42	Wonomulyo	Campurjo	Jalan Kabupaten
43	Wonomulyo	Campurjo	Jalan Kabupaten
44	Wonomulyo	Campurjo	Poskesdes Campurjo
45	Wonomulyo	Sumberjo	Jalan Kabupaten
46	Wonomulyo	Sumberjo	Kantor Desa Sumberjo
47	Wonomulyo	Bumiayu	Jalan Kabupaten
48	Wonomulyo	Bumiayu	Jalan Kabupaten
49	Wonomulyo	Bumiayu	Jalan Kabupaten
50	Wonomulyo	Kebun Sari	Jalan Kabupaten
51	Wonomulyo	Kebun Sari	SDN 032 Inp Kebunsari
52	Wonomulyo	Kel. Sidodadi	Kantor UPTD Maloso Kiri
53	Wonomulyo	Kel. Sidodadi	Gudang
54	Wonomulyo	Kel. Sidodadi	Tanah Untuk Lantai Jemur
55	Wonomulyo	Banua Baru	Stadion Mini Wonomulyo
56	Wonomulyo	Banua Baru	SLB Wonomulyo
57	Wonomulyo	Galeso	Poskesdes Mampie
58	Wonomulyo	Bakka-Bakka	Poskesdes Bakka - Bakka
59	Wonomulyo	Kel. Sidodadi	Kantor Cabdis Pendidikan Wonomulyo
60	Wonomulyo	Kel. Sidodadi	TK Pembina Sidodadi
61	Matakali	Bunga-Bunga	Jalan Kabupaten
62	Matakali	Bunga-Bunga	Jalan Kabupaten
63	Matakali	Bunga-Bunga	Relokasi Sub Station Kakao
64	Matakali	Bunga-Bunga	Poskesdes Bunga-Bunga
65	Matakali	Pasiang	Kolam Pembibitan Air Tawar
66	Matakali	Pasiang	Tanah Balai Benih Ikan



No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUNTUKAN
67	Matakali	Indomakombong	Pustu Indumakkombong
68	Matakali	Barumbung	Pustu Barumbung
69	Matakali	Pasiang	Poskesdes Matakali
70	Matakali	Patampanua	Pustu Patampanua
71	Matakali	Indomakombong	Pembuatan Sekolah
72	Matakali	Matakali	Tanah Monumen Batu Bendera
73	Bulo	Karombang	Poskesdes Karombang
74	Bulo	Sabura	Poskesdes Sabura
75	Bulo	Daala Timur	Poskesdes Daala Timur
76	Bulo	Sepporakki	Poskesdes Sepporaki
77	Bulo	Ihing	Poskesdes Ihing
78	Bulo	Lenggo	Poskesdes Lenggo
79	Bulo	Pulliwa	Poskesdes Pulliwa
80	Bulo	Patambanua	Poskesdes Patambanua
81	Bulo	Lenggo	SDN 071 Inp. Lenggo
82	Bulo	Lenggo	SMPN Satap Lenggo
83	Bulo	Sabura	SEKOLAH (SMP Neg. Satap Sabura)
84	Bulo	Daala Timur	Bangunan sekolah
85	Anreapi	Kel. Anreapi	Puskesmas Anreapi
86	Anreapi	Kel. Anreapi	Lapangan
87	Binuang	Kuajang	Perluasan Lokasi Puskesmas Polewali
88	Binuang	Mammi	TPU Mammi
89	Tinambung	Tandung	Kantor BPP Tinambung
90	Tinambung	Kel. Tinambung	kantor

Tabel 3.38

Daftar Usulan Sertifikat Hak Pakai Instansi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUNTUKAN
1	Matakali	Patampanua	TK Pembina Patampanua HI
2	Tapango	Riso	Pustu Riso
3	Binuang	Paku	Pustu Paku
4	Tapango	Batu	Pustu Batu
5	Tapango	Riso	SDN 044 Inp. Riso
6	Campalagian	Sumarrang	SDN 054 Ujung Galung
7	Binuang	Kaleok	Poskesdes Tandipura
8	Binuang	Kaleok	Poskesdes Kaleok
9	Binuang	Sidorejo	Poskesdes Sidorejo



No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUNTUKAN
10	Wonomulyo	Arjosari	Poskesdes Arjosaari
11	Binuang	Rea	Polindes Rea
12	Balanipa	Galung Tulu	SDN 044 Kp. Baru Subik
13	Balanipa	Lambepada	SDN 057 Lambepada
14	Campalagian	Kenje	TPU Kenje
15	Campalagian	Suruang	TK Pembina Suruang
16	Tinambung	Kel. Tinambung	TK Pembina Tinambung
17	Campalagian	Padang Timur	TK Pembina Padang Timur
18	Campalagian	Lagi agi	SDN 063 Lagi Agi
19	Wonomulyo	Galeso	Pustu Galeso
20	Matakali	Seppong	SDN Seppong
21	Wonomulyo	Sidodadi	Perumahan Medis Wonomulyo
22	Wonomulyo	Sidodadi	Puskesmas Wonomulyo Lama
23	Binuang	Tonyaman	TPS Skala Kota
24	Binuang	Mirring	TPU Silopo
25	Balanipa	Pambusuang	TPU Pambusuang
26	Matakali	Patampanua	TPU Patampanua
27	Polewali	Lantora	TPU Lantora
28	Luyo	Batupanga Daala	Pustu Batupanga daala
29	Luyo	Pussui	Pustu Pussui
30	Tutar	Taramanu Toa	SMP Satap Tapparang
31	Tutar	Pullewani	Pustu Pullewani
32	Tutar	Taramanu	Kantor Camat Tutar
33	Tutar	Poda-Poda	Poskesdes Lombang
34	Tutar	Poda-Poda	SMP Satap Poda Poda
35	Tutar	Poda-Poda	SDN 002 Pumbejagi
36	Tutar	Arabua	TK. Pembina Arabua
37	Tutar	Ambopadang	SDN 009 Lombok I
38	Tutar	Ambopadang	Pustu Ambopadang
39	Tutar	Taramanu	SDN Roboang
40	Tutar	Taloba	SDN 040 Bunu
41	Tutar	Taloba	Pustu Taloba
42	Tutar	Tubbi	Pustu Tubbi
43	Tutar	Piriang Tapiko	Pustu Piriang Tapiko
44	Tutar	Besoangin Utara	Pustu Besoangin Utara
45	Bulo	Bulo	BPP Bulo
46	Luyo	Baru	Pustu Baru
47	Polewali	Lantora	TPI Lantora
48	Polewali	Polewali	Kantor Kelurahan Polewali
49	Anreapi	Anreapi	Puskesmas Lama Anreapi
50	Anreapi	Anreapi	Perumahan Dinas Puskesmas Anreapi



No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUNTUKAN
51	Anreapi	Anreapi	Kantor Lurah Anreapi
52	Wonomulyo	Tumpiling	SDN Kampuno
53	Limboro	Salarri	SMP Negeri Satap Salarri

Tabel 3.39
Data Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2021

No	Kecamatan	Kel/Desa	Peruntukan	LUas Tanah (M2)
1	Balanipa	Tammangalle	Puskesmas Balanipa	4.292
2	Balanipa	Tammangalle	Kantor Camat Balanipa	6.390
3	Tinambung	Lekopadis	Sport Center Tinambung	47.158
JUMLAH				57.840

Tabel 3.40
Data Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2020

No	Kecamatan	Kel/Desa	Peruntukan	Luas Tanah (M2)
1	Matakali	Pasiang	Puskesmas Matakali	6.268
2	Anreapi	Anreapi	Puskesmas Anreapi	4.547
3	Matangnga	Matangnga	Puskesmas Matangnga	3.679
JUMLAH				14.494

Tabel 3.41
Data Pengadaan Tanah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019

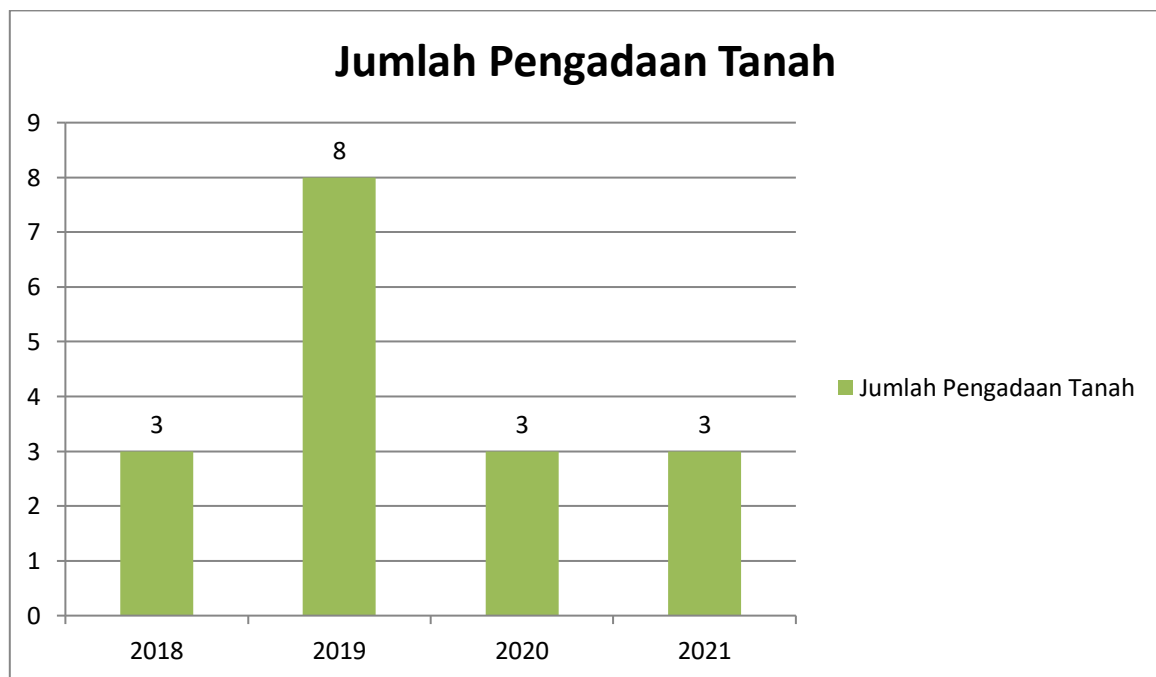
No	Lokasi	Peruntukan	Luas Tanah (M2)
1	2	3	4
1	Kec. Polewali	Pekuburan Madatte	4,198
2	Kec. Tapango	Kantor Camat Tapango	357
3	Kec. Tinambung	Kantor Camat Tinambung	12,671
4	Kec. Balanipa	SD 044 Kp. Baru Subik	2,045
5	Binuang	Puskesmas Polewali	964
6	Binuang	TPS Skala Kota	925
7	Wonomulyo	Pelebaran Jalan Wonomulyo	22,507
8	Kec. Polewali	Masjid dan Pusat Dakwah Islam	14,039
Jumlah			57,706



Tabel 3.42
Data Pengadaan Tanah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2018

No	Lokasi	Peruntukan	Luas Tanah (M2)	Ket
1	2	3	4	5
1	Lokasi TPA Desa Paku	Desa Paku, Kec. Binuang	14.581	
2	Lokasi Puskesmas Tinambung	Desa Batulaya, Kec. Binuang	13.292	
3	Lokasi Pekuburan Kenje	Desa Kenje, Kec. Campalagian	1.402	
Jumlah			29.272	

Grafik 3.1
Data Pengadaan Tanah Tahun 2018 s.d 2021



Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah serta percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Bidang Pertanahan membentuk Tim Pembebasan dan Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar yang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota



Kendala yang sering dihadapi dalam proses pengadaan Tanah yaitu : tidak adanya kesepakatan harga tanah antara Pemda dengan pemilik lokasi

Solusi memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pemilik lokasi bahwa harga ganti rugi sesuai dengan hasil Resume Tim Penaksir harga



*Tabel 3.43
Data Penanganan Sengketa Tanah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2021*

No	Waktu	Pihak Pengadu/Pelapor	Pihak Terlapor	Obyek Sengketa (Peruntukan, Letak)	Pokok Sengketa	Bentuk Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Januari 2021	Abdul Salam	Pemda	Lokasi Lapangan Sepakbola Kelurahan Anreapi Kec. Anreapi	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik pelapor	Inventarisasi, Survey lokasi dan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah (Selesai)
2.	Februari 2021	Pemda	Mama Rudi dkk	Lokasi Relokasi Rusunawa Kel. Madatte Kec. Polewali	Tindak lanjut penyelesaian pemindahan lokasi relokasi Rusunawa	Melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah (tidak ada kesepakatan karena pihak Mama Rudi walk out dari ruang rapat)
3.	Februari 2021	Sekelompok masyarakat Desa Nepo	Pemda	Lokasi Lapangan Sepakbola Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik pelapor pada saat pemda melakukan pensertifikatan tanah.	Melakukan peninjauan lokasi dan rapat antara Pemda, Pemdes Nepo dengan masyarakat Desa Nepo yang mengklaim lokasi tersebut (sementara berproses)
4.	Februari 2021	Kades Paku	Salah satu warga Desa Paku	Lokasi Pasar Paku Desa Paku Kecamatan Binuang	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik warga	Survey lokasi, rapat dan melakukan kunjungan ke warga yang mengklaim lokasi tersebut.
5.	Februari 2021	Polsek Luyo	Pemda	Lokasi Polses Luyo Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli	Adanya tumpang tindih sertifikat antara lokasi Polsek Luyo dengan Tanah milik pemda	Survey lokasi, rapat dan melakukan pengukuran ulang pada lokasi tersebut



Permasalahan yang sering dihadapi dalam Pencapaian Indikator Sasaran Strategis III :

- Dokumen/berkas Aset tanah pemda yang diusulkan untuk pembuatan sertifikat belum lengkap. Sehingga perlu dilakukan penelusuran ke pemilik lokasi sebelumnya
- Pemilik Lokasi yang sebelumnya sudah pindah atau sudah meninggal sehingga dilakukan penelusuran ke ahli waris.
- Masih banyaknya lokasi yang diklaim oleh oknum atau organisasi tertentu sehingga perlu dilakukan penyelesaian sengketa/konflik.

Beberapa solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Indiktor Sasaran Strategis III :

- Melakukan kerjasama dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.
- Membentuk Tim percepatan sertifikasi tanah milik pemda yang terdiri dari : BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar, Bidang aset Badan Keuangan, Badan Pendapatan dan OPD terkait serta Pemerintah setempat.



TAHAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DASAR HUKUM :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); dan
- 2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara



PERSIAPAN

Instansi yang memerlukan tanah membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah dilengkapi dengan dokumen study Kelayakan yang disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polman.

1. Pendaftaran/persertifikatan tanah; dan
2. Penyerahan sertifikat tanah milik Pemda kepada Bidang Aset Badan Keuangan Kab. Polman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.



PERSIAPAN

1. Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kab. Polman;
2. Pemberitahuan rencana Pembangunan;
3. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
4. Konsultasi Publik rencana pembangunan;
5. Penetapan lokasi pembangunan; dan
6. Pengumuman penetapan lokasi.



PELAKSANAAN

1. Pengukuran dan pengumpulan data bidang tanah dan pihak yang berhak;
2. Penilaian ganti kerugian oleh Appraisal/KJPP;
3. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian;
4. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
5. Pemberian ganti kerugian; dan
6. Pelepasan objek pengadaan tanah.



PENYERAHAN



Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Kegiatan Indikator Sasaran Strategis III



**Survey Lokasi Pengadaan Tanah Puskesmas Balanipa
Kec. Balanipa**



**Survey Lokasi Pengadaan Kantor Camat Balanipa Bersama Tim Appraisal
dan Pemilik Lokasi**



Rapat Identifikasi data Lokasi Sport Center Tinambung

4. Sasaran Strategis IV : “Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran”

- Dengan Indikator Kinerja : **Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder**

Tabel 3.44
Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS I : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Predikat	Baik	Dalam Penilaian	Belum Diketahui

Untuk memastikan tercapainya Indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder” Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan mendapatkan pelayanan terbaik terutama dari segi efisiensi waktu.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang	Faktor Penghambat
a. Meningkatnya Motivasi Pegawai	a. Masih kurangnya Tenaga ASN, sehingga menghambat pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat/stakeholder
b. Berkembangnya Teknologi dan Informasi, sehingga memudahkan memberikan informasi kepada Masyarakat/stakeholder	b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga pelayanan yang diberikan kadang kurang memuaskan
c. Adanya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ombusman RI sehingga mendorong ASN untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat/stakeholder	c. Masih kurangnya pengetahuan aparaturnya dalam memberikan informasi yang disebabkan kurangnya bimbingan dan pelatihan yang diikuti



Solusi yang dapat diberikan

- a. Penataan Ruang Front Office sebagai pusat pemberian pelayanan
- b. Membuat Struktur Organisasi Pelayanan, yang terdiri dari perwakilan setiap bidang sehingga memudahkan Masyarakat/Stakeholder dari mencari informasi kegiatan Dinas

Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis IV **“Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran**

Tabel 3.45
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis IV

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	256.119.400	100%	254.677.100	100%	99	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	3 Jenis	1.142.000	3 Jenis	1.142.000	100	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	44 Jenis	31.528.100	44 Jenis	31.528.100	100	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum yang tersedia	633 Kotak	13.475.000	640 Kotak	13.474.500	100	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 Jenis	7.293.000	2 Jenis	7.293.000	100	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksempler	1 Eksempler	1.440.000		-		0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	57 Laporan	201.241.300	57 Laporan	201.239.500	100	100	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	25 Laporan		25 Laporan		100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100 Persen	4.000.000	100 Persen	3.937.000	100 Persen	98	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis	4.000.000	1 Jenis	3.937.000	100	98	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	124.338.443	100%	86.360.606		69	



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola	400 Surat	9.924.000	400 Surat	9.924.000	100	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik yang terpenuhi	2 Jenis	85.271.443	2 Jenis	47.293.606	100	55	Disesuaikan dengan Jumlah tagihan listrik dan air
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	1200 M2	29.143.000	1200 M2	29.143.000	100	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	80.653.600	100%	77.808.300	100%	96	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang terpelihara	7 Unit	52.408.600	7 Unit	49.714.300	100	95	
		Jumlah Unit Kendaraan yang dilengkapi Surat Izin	18 Unit		18 Unit		100		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeluer	1 Jenis	1.545.000	1 Jenis	1.439.000	100	93	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Luas bangunan dan Halaman Kantor yang dipelihara	1200 M2	10.000.000	1200 M2	10.000.000	100	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	3 Jenis	16.700.000	3 Jenis	16.655.000	100	100	

5. Sasaran Strategis V : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja”

- Dengan Indikator Kinerja : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.46
Sasaran Strategis V

SASARAN STRATEGIS I :				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	Dalam Penilaian	Belum diketahui



Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan mampu meningkatkan Predikat Sakip Perangkat Daerah menjadi A, walaupun target yang direncanakan untuk tahun 2021 BB.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang	Faktor Penghambat
a. Optimalnya Pendampingan dari TIM SAKIP Kabupaten.	a. Terbatasnya jumlah aparatur yang mengelola data kinerja
d. Tersedia Aplikasi SIMKINERJA dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA)	b. belum tertibnya pengelolaan data kinerja sehingga memperlambat laporan capaian kinerja
c. Tersedianya Cascading (Perencanaan Kinerja secara berkala)	c. Adanya perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya sehingga capaian kinerja kurang terukur
d. Adanya Tambahan Tunjangan Kinerja (Tukin) sehingga meningkatkan kinerja aparatur.	

Solusi yang dapat diberikan

- a. Meningkatkan Koordinasi melalui pelaksanaan rapat-rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi kinerja.
- b. Menyediakan kelengkapan data-data kinerja Dinas, sehingga memudahkan dalam pelaporan capaian kinerja.
- c. Penyampaian Laporan secara tepat waktu.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis V “**Predikat SAKIP Perangkat Daerah**” dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.47
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis V

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	23.794.200	100%	23.794.200	100%	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja/Perubahan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dok	12.293.800	2 Dok	12.293.800	100	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dok	7.622.000	2 Dok	7.622.000	100	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat	1 Laporan	3.878.400	1 Laporan	3.878.400	100	100	

6. Sasaran Strategis VI : “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah”

- Dengan Indikator Kinerja : Opini Pengelolaan Keuangan

Tabel 3.48
Sasaran Strategis VI

SASARAN STRATEGIS I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Opini Pengelolaan Keuangan	Predikat	WTP	Dalam Penilaian	Belum diketahui



Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan dari BPK “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan menindak lanjuti semua hasil temuan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Dan diharapkan untuk Tahun 2021 Kabupaten Polewali Mandar dapat mempertahankan Predikat Opini WTP.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang	Faktor Penghambat
a. Tingginya Komitmen seluruh jajaran ASN dan PTT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi pengelolaan keuangan berbasis akrual.
e. Tersedianya Aplikasi Keuangan (mulai dari Perencanaan Kerja, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai Pelaporan Keuangan	b. Belum optimalnya tertib administrasi belanja modal (asset)
e. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keuangan secara bertahap.	

Solusi yang dapat diberikan

- d. Meningkatkan Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan pelaporan keuangan berbasis akrual dan pelaporan asset
- e. Peningkatan tertib administrasi keuangan dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan

Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis VI “**Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran**



Tabel 3.49
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis VI

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	Rp	
1	2	3	4		5		6		10
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	2.398.648.130	100%	2.359.599.502		98	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	27 Orang	2.395.340.530	28 Orang	2.356.291.902	100	98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	3.307.600	1 Dok	3.307.600	100	100	

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp10.024.857.164,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp10.145.417.530,00 atau terealisasi sebesar 98,81% , sisa kurang anggaran Rp120.560.366,00. Adapun perincian realisasi belanja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar ini berasal dari :

- A. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.277.256.426,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp8.371.075.727,00 atau terealisasi sebesar 98,88%, sisa kurang anggaran Rp93.819.301,00 dengan perincian terdiri dari :

- 1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.356.291.902,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp2.405.990.530,00 atau terealisasi sebesar 97,93%, sisa kurang anggaran Rp49.698.628,00



- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.785.964.524,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp3.830.085.197,00 atau terealisasi sebesar 98,85%, sisa kurang anggaran Rp44.120.673,00
 - 3) Realisasi Hibah sebesar Rp2.135.000.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp2.135.000.000,00 atau terealisasi sebesar 100%
- B. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.747.600.738,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.774.341.803,00 atau terealisasi sebesar 98,49%, sisa kurang anggaran Rp26.741.065,00 dengan perincian terdiri dari :
- 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.366.737.628,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.367.295.803,00 atau terealisasi sebesar 99,96%, sisa kurang anggaran Rp558.175,00
 - 2) Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.439.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.545.000,00 atau terealisasi sebesar 93,14%, sisa kurang anggaran Rp106.000,00
 - 3) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp379.424.110,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp405.501.000,00 atau terealisasi sebesar 93,57%, sisa kurang anggaran Rp26.076.890,00

Program dan kegiatan yang terlaksana tahun anggaran 2021 terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, keseluruhan Realisasi Belanja per Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.50
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.794.200	23794.200	100
1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.293.800	12.293.800	100
1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.622.000	7.622.000	100
1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.878.400	3.878.400	100



KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.409.298.130	2.359.599.502	99,44
2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.395.340.530	2.356.291.902	97,93
2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	3.307.600	3.307.600	100
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.119.400	254.677.100	99,44
6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.142.000	1.142.000	100
6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.528.100	31.528.100	100
6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.475.000	13.475.000	100
6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.293.000	7.293.000	100
6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0	0
6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.241.300	201.239.500	99
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	4.000.000	100
7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	100
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	124.338.443	86.360.606	99,46
8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.924.000	9.924.000	100
8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.271.443	47.293.606	55,46
8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.143.000	29.143.000	100
09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.653.600	77.808.300	96,47
9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.408.600	49.714.300	94,86
9.05	Pemeliharaan Mebel	1.545.000	1.439.000	93,14
9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100
9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.700.000	16.655.000	99,73
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
2	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	650.000.000	643.485.000	99,00
2.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan & Pengembangan Kawasan Permukiman & Permukiman Kumuh	650.000.000	643.485.000	99,00
4	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	446.081.000	419.919.110	94,14
4.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	446.081.000	419.919.110	94,14



KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
5	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Daerah pada Daerah/Kabupaten	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
5.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
6	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	232.558.900	232.494.100	99,97
6.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	182.183.200	182.160.100	99,99
6.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.375.70	50334.000	99,92
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
6	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.724.127.957	1.722.028.535	99,88
6.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.624.128.257	1623.322.305	99,95
6.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	99.999.700	98.706.230	98,71

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target penyerapan anggaran sampai dengan akhir 31 Desember 2021 walaupun ada beberapa kegiatan yang harus mengalami penyesuaian karena adanya rasionalisasi, target kinerja dan waktu sehingga terjadi perubahan dan harus melakukan revisi ataupun perubahan anggaran kas.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat seluruh kegiatan Dinas secara maksimal sesuai yang telah direncanakan dengan kondisi anggaran yang sudah ditentukan.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok, fungsi. Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan meski adanya penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat dijalankan secara maksimal, serta adanya refofusing anggaran yang membuat beberapa kegiatan dilakukan penundaan. Dan untuk kegiatan yang telah berjalan dilaksanakan dengan menerapkan Social Distancing sesuai arahan dari Pemerintah agar kegiatan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dari enam (6) indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2019-2023 yang terdiri dari tiga (3) indikator yang merupakan tugas Pokok Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu Membantu bupati dalam melaksanakan urusan perumahan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dengan capaian. Untuk indikator

1. **“Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni” capaian kinerja Sangat Berhasil**
2. **“Luas Kawasan Kumuh” capaian kinerja Cukup Berhasil**



3. “Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat” capaian kinerja Cukup Berhasil

Berdasarkan capaian ketiga indikator diatas dengan capaian diatas 50% (Permenpan No. 54 Tahun 2014), maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian 79,96%

Dengan realisasi anggaran belanja 2021 sebesar Rp10.024.857.164,00 dengan anggaran sebesar Rp10.145.417.530,00 atau terealisasi sebesar 98,81%, sehingga sisa anggaran Rp120.560.366. sisa anggaran merupakan kesisaan dari pemeliharaan pekerjaan fisik sebesar 5% dan beberapa belanja yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya Pandemi Covid - 19 dan sedikit hambatan karena faktor-faktor eksternal di luar jangkauan dan kemampuan Dinas.

B. LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Diharapkan capaian program dan kebijakan di tahun mendatang akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Dengan upaya serta langkah – langka sebagai berikut :

1. Menyediakan Dana Sharing (Dana APBD Kabupaten) untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
2. Memberikan tanggung jawab penuh kepada bidang permukiman dalam penanganan kawasan kumuh.
3. Memprioritas pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh perkotaan.
4. Bagi Instansi yang membutuhkan lahan/lokasi untuk kepentingan umum agar mengajukan proposal pengadaan tanah sehingga dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan tanah untuk tahun berikutnya.

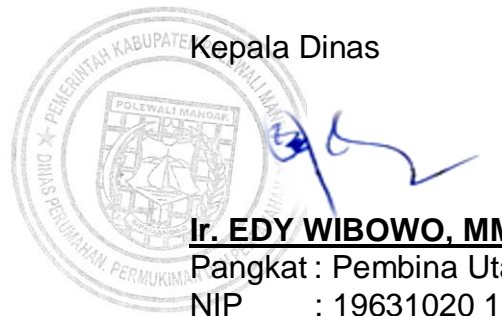
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kepada tahun 2021 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Polewali Mandar



Saran dan kritik yang sifatnya koreksi membangun, sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP ini selanjutnya.

Polewali, 16 Februari 2022

Kepala Dinas



Ir. EDY WIBOWO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631020 199103 1 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Saya : **A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP, M.Si**
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Berjanji untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditandai dengan Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yang Memiliki Rumah Layak Huni **naik dari 82,75 Persen menjadi 83,40 Persen.**
2. Meningkatnya Kawasan Permukiman Yang Layak ditandai dengan Luas Kawasan Kumuh **naik dari 5,5 Ha menjadi 21 Ha.**
3. Meningkatnya Kualitas Pertanahan Pemerintah Daerah ditandai dengan Persentase Aset Tanah Yang Sudah Bersertifikat **naik dari 38,07 Persen menjadi 53,02 Persen.**
4. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder **dengan target Sangat Baik.**
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja ditandai dengan Predikat SAKIP Perangkat Daerah **dengan target BB.**
6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ditandai dengan Opini Pengelolaan Keuangan **dengan target WTP.**

Total Alokasi Belanja Langsung :
Rp. 9.907.490.559,-

Terima Kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. K. H. Wahid Hasyim Nomor 3 Pekkabata, Kode Pos 91314
Telepon. 0428-21087 Faks. 0428-21087

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,

A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710403 199101 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	82,75%	83,40%
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	5,5 Ha	21 Ha
3	Meningkatkan Kualitas Pertanahan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Tanah yang sudah bersertifikat	38,07%	53,02%
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Sangat Baik
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,722,707,802.00	DAU
2	Kawasan Permukiman	Rp 1,023,000,000.00	DAU
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 4,205,095,900.00	DAU
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 232,558,900.00	DAU
5	Penatagunaan Tanah	Rp 1,724,127,957.00	DAU
JUMLAH		Rp 9,907,490,559.00	DAU

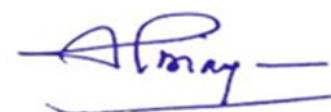
Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,
 BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS PERUMAHAN,
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,



A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19710403 199101 2 002

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	83,40%	87,80%	105	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.205.095.900	4.200.753.711	99,9
					Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	4.205.095.900	4.200.753.711	99,9
					Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	4.205.095.900	4.200.753.711	99,9
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	232.558.900	232.494.100	99,9
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	232.558.900	232.494.100	99,9
					Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	182.183.200	182.160.100	99,9
					Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	50.375.700	50.334.000	100

Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	21 Ha	12,61 Ha	60,04	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.096.081.000	1.063.404.110	97
					Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	446.081.000	419.919.110	94
					Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	446.081.000	419.919.110	94
					Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	650.000.000	643.485.000	99
					Sub Kegiatan :Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	650.000.000	643.485.000	99
Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat	53,02%	39,49%	74,48	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.724.127.957	1.722.028.535	99,9
					Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparaannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	1.724.127.957	1.722.028.535	99,9
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.624.128.257	1.623.322.305	99,9
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	99.999.700	98.706.230	99,9

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.794.200	23794.200	100
1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.293.800	12.293.800	100
1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.622.000	7.622.000	100
1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.878.400	3.878.400	100
KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.409.298.130	2.359.599.502	99,44
2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.395.340.530	2.356.291.902	97,93
2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	3.307.600	3.307.600	100
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.119.400	254.677.100	99,44
6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.142.000	1.142.000	100
6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.528.100	31.528.100	100
6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.475.000	13.475.000	100
6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.293.000	7.293.000	100
6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0	0
6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.241.300	201.239.500	99
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	4.000.000	100
7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	100
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	124.338.443	86.360.606	99,46
8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.924.000	9.924.000	100
8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.271.443	47.293.606	55,46
8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.143.000	29.143.000	100
09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.653.600	77.808.300	96,47
9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.408.600	49.714.300	94,86
9.05	Pemeliharaan Mebel	1.545.000	1.439.000	93,14
9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100
9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.700.000	16.655.000	99,73

1	2	3	4	5
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
2	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	650.000.000	643.485.000	99,00
2.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan & Pengembangan Kawasan Permukiman & Permukiman Kumuh	650.000.000	643.485.000	99,00
4	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	446.081.000	419.919.110	94,14
4.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	446.081.000	419.919.110	94,14
KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
5	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Daerah pada Daerah/Kabupaten	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
5.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
6	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	232.558.900	232.494.100	99,97
6.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	182.183.200	182.160.100	99,99
6.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.375.70	50334.000	99,92
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
6	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.724.127.957	1.722.028.535	99,88
6.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.624.128.257	1623.322.305	99,95
6.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	99.999.700	98.706.230	98,71